



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

BPVP KENDARI
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS



**PELATIHAN
VOKASI**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN ANGGARAN 2025



BPVP KENDARI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPVP Kendari selama Tahun Anggaran 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPVP Kendari selama Tahun Anggaran 2025. Penyusunan laporan ini merupakan implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

LKjIP Tahun 2025 menyajikan informasi mengenai capaian kinerja organisasi yang diukur berdasarkan sasaran strategis dan target Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Capaian tersebut merupakan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pelatihan vokasi dan produktivitas yang dilaksanakan secara terukur dan akuntabel.

Capaian kinerja yang diperoleh pada Tahun Anggaran 2025 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari pada tahun-tahun selanjutnya.

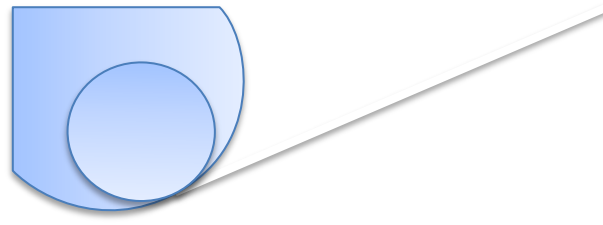
Kendari, 19 Januari 2026

Kepala,

Amran, S.T.
NIP. 19830312 200901 1 014

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Singkatan	vi
Ikhtisar Eksekutif.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Dan Fungsi	4
C. Peran Strategis Bidang Pelatihan Vokasi	9
D. Isu Strategis Bidang Pelatihan Vokasi	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
A. Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan	16
A.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Ketenagakerjaan	16
A.2. Target Kinerja	20
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
A. CAPAIAN KINERJA	33
A.1. Analisis Capaian Kinerja IKK-1	35
A.2. Analisis Capaian Kinerja IKK-2	44
A.3. Analisis Capaian Kinerja IKK- 3	54
A.4. Analisis Capaian Kinerja IKK- 4	55
B. REALISASI ANGGARAN	56
B.1. Realisasi Anggaran Tahun 2025	56
B.2. Tabel Dan Grafik Realisasi Anggaran Tahun 2016 s.d 2025	59
B.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Penyerapan Anggaran .	61
B.4 Pencapaian Tahun 2025 dilakukan melalui kegiatan.....	61
B.5. Hambatan yang dihadapi	63
B.6. Solusi yang dilakukan atas hambatan yang dihadapi	63
B.7. Upaya yang akan dilakukan pada tahun 2026.....	64
BAB IV PENUTUP	66



LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja (PK) 2025
2. Capaian Kinerja 2025
3. Lampiran IKK 1
4. Lampiran IKK 2
5. Lampiran IKK 3
6. Nilai IKPA BPVP Kendari
7. Daftar Revisi DIPA
8. Realisasi Anggaran
9. Nilai Eveluasi Kinerja Anggaran

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Pegawai BPVP Kendari.....	5
Tabel 1.2. Komposisi PPPK BPVP Kendari Menurut Sub Kelompok	7
Tabel 1.3. Komposisi PPNPN BPVP Kendari Menurut Sub Kelompok	7
Tabel 1.4. Komposisi ASN BPVP Kendari Berdasarkan Golongan	7
Tabel 1.5. Komposisi ASN BPVP Kendari Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	8
Tabel 2.1. kebijakan dan Agenda Kementerian Ketenagakerjaan.....	16
Tabel 2.2. Target Kinerja Kementerian Ketenagakerjaan Ditjen	21
Tabel 2.3. Target Kinerja Kementerian Ketenagakerjaan Ditjen	26
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	30
Tabel 3.1. Capaian Kinerja BPVP KENDARI 2025	33
Tabel 3.2. Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan 1 Tahun 2025	35
Tabel 3.3. Data Sertifikasi Tahun 2025.....	35
Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja	39
Tabel 3.5. Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan 2 Tahun 2025	44
Tabel 3.6. Data Pelatihan PBK BPVP Kendari.....	44
Tabel 3.7. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 s.d 2025.....	45
Tabel 3.8. Target dan Realisasi Pelaksanaan PBK UPTP Tahun 2025	47
Tabel 3.9. Target dan Realisasi Pelaksanaan PBK di UTPD Tahun 2025	48
Tabel 3.10. Target dan Realisasi Pelaksanaan PBK PFLK Tahun 2025	50
Tabel 3.11. Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan 3 Tahun 2025	54
Tabel 3.12. Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan 4 Tahun 2025	55
Tabel 3.13. Tabel Revisi yang Terjadi Pada Tahun 2025	57
Tabel 3.14. Rekapitulasi Realisasi Keuangan BPVP Kendari Tahun 2016 – 2025..	59
Tabel 3.15. Realisasi Keuangan BPVP Kendari 2025.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi BPVP Kendari	4
Gambar 3.1. Grafik Realisasi Pengukuran Indikator Kinerja (IKK).	38
Gambar 3.2. Grafik Perbandingan Persentase Capaian Indikator Kinerja	41
Gambar 3.3. Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 s/d 2025	46
Gambar 3.4. Grafik Realisasi PBK UPTP BPVP Kendari	48
Gambar 3.5. Grafik Realisasi PBK UPTD Binaan BPVP Kendari Tahun 2025	49
Gambar 3.6. Grafik Nilai Kinerja Anggaran Perjenis Belanja	58
Gambar 3.7. Grafik Rekapitulasi dan Realisasi Keuangan BPVP Kendari 5	60

DAFTAR SINGKATAN

AEC	<i>ASEAN Economic Community</i>
APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APBN-P	Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
BLK	Balai Latihan Kerja
BPVP	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
BPS	Biro Pusat Statistik
BNSP	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Ditjen Binalavotas	Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
IKK	Indikator Kinerja Kegiatan
IKP	Indikator Kinerja Program
IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
MEA	Masyarakat Ekonomi ASEAN
PK	Perjanjian Kerja
Renstra	Rencana Strategis
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SDM	Sumber Daya Manusia
PBK	Pelatihan Berbasis Kompetensi
PBL	Project Based Learning
PK	Perjanjian Kerja
POK	Petunjuk Operasional Kerja
PMPRB	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
UPTD	Unit Pelaksana Teknis Daerah
UPTP	Unit Pelaksana Teknis Pusat



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

BPVP KENDARI

BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS



**PELATIHAN
VOKASI**

IKHTISAR EKSEKUTIF

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
2025**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024. BPVP Kendari mempunyai tugas melaksanakan pelatihan vokasi, pemagangan, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta sertifikasi kompetensi kerja.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, BPVP Kendari menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014. Implementasi SAKIP diwujudkan melalui penyusunan Perjanjian Kinerja pada awal tahun sebagai komitmen pencapaian target kinerja, serta pelaksanaan pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja secara berkala. Seluruh proses tersebut didokumentasikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah melalui mekanisme reuview internal guna menjamin keandalan data dan kesesuaian antara perencanaan dan hasil pelaksanaan.

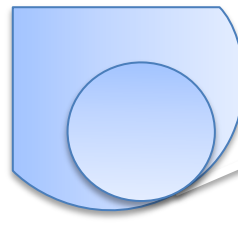
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPVP Kendari Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban. Ruang lingkup laporan ini meliputi gambaran umum satuan kerja, rencana dan target kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, hasil pengukuran capaian kinerja, serta evaluasi dan analisis terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kendala yang dihadapi, dan langkah-langkah perbaikan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Tahun 2025, capaian indikator kinerja BPVP Kendari terhadap target Rencana Strategis mencapai 100 persen. Dari sisi anggaran, BPVP Kendari memperoleh alokasi DIPA Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025 sebesar Rp25.515.105.000,00 yang setelah dilakukan revisi menjadi Rp21.111.544.000,00. Realisasi anggaran mencapai

Rp18.607.846.745,00 atau sebesar 88,14 persen. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan BPVP Kendari dalam mendukung peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Capaian Kinerja Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Realisasi Tahun 2025
1.	Terlaksananya Pengembangan sistem dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi Profesi	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	992 Orang	1.024 Orang
2.	Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan vokasi dan pemagangan yang Berkualitas	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	1.840 Orang	1.872 Orang
		Koordinasi penyelenggaraan Pelatihan dan Pemagangan bersama industri	1 Kegiatan	Kegiatan
3.	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Binalavotas	Jumlah tenaga kerja yang meningkat produktivitasnya	1 Kegiatan	Kegiatan
4.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Terlaksananya Layanan Dukungan manajemen Internal	5 Layanan	5 Layanan
Jumlah Anggaran Tahun 2025 – Pagu Awal			: Rp 25.515.105.000,-	
Jumlah Anggaran Setelah Revisi Tahun 2025 – Pagu Revisi dengan blokir			: Rp 21.111.544.000,-	
Jumlah Anggaran setelah Revisi Tahun 2025 – Pagu Revisi tanpa blokir			: Rp 19.544.976.000,-	
Jumlah Anggaran Terblokir Tahun 2025			: Rp 1.566.568.000,-	
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2025			: Rp18.607.846.745,-	
Persentase Realisasi Keuangan Tahun 2025 dengan blokir			: 88,14%	
Persentase Penyerapan Anggaran Tahun 2025 tanpa blokir			: 95,21%	
Persentase Realisasi Fisik			: 101.24%	



NO	Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Binalavotas	596.096.000	587.633.000	473.403.537	(80.56%)
2	Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas	12.873.054.000	6.533.288.000	5.716.622.057	(87.50%)
3	Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Binalavotas	225.730.000	15.398.000	15.396.810	(99.99%)
4	Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	11.820.255.000	13.975.225.000	12.402.424.341	(88.75%)
TOTAL		25.515.105.000	21.111.544.000	18.607.846.745	88,14%

Kemandirian suatu bangsa salah satunya ditentukan oleh tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari secara konsisten melaksanakan program pelatihan berbasis kompetensi yang berorientasi pada kebutuhan dunia kerja, sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020–2029.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada RPJM tahun perdana sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja menunjukkan bahwa BPVP Kendari telah memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja, walaupun dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, pada bagian ini disajikan uraian capaian kinerja sasaran kegiatan BPVP Kendari Tahun Anggaran 2025.



1. Pelatihan Berbasis Kompetensi.

Sasaran kegiatan dari Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan yang Berkualitas ditetapkan melalui indikator jumlah tenaga kerja yang memperoleh pelatihan berbasis kompetensi. Target awal Tahun Anggaran 2025 sebesar 1.840 orang, sedangkan realisasi capaian mencapai 1.872 orang. Dengan demikian, capaian kinerja melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 101,74 persen.

2. Sertifikasi Kompetensi Kerja.

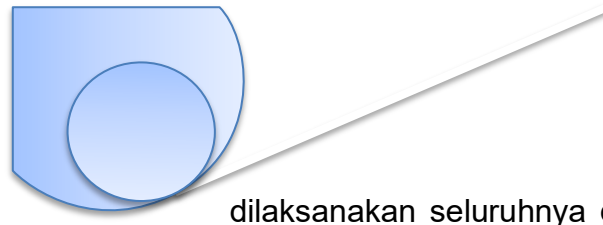
Sasaran Kegiatan Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi Kerja diukur melalui indikator jumlah alumni pelatihan berbasis kompetensi yang mengikuti sertifikasi. Target yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar 992 orang. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, realisasi capaian mencapai 1.024 orang atau sebesar 103,23 persen, sehingga target yang telah ditetapkan dapat terlampaui.

Dari total 1.024 peserta pelatihan yang mengikuti sertifikasi kompetensi kerja tersebut, sebanyak 875 orang dinyatakan Kompeten, sedangkan 149 orang dinyatakan Belum Kompeten. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan kualitas pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan tingkat kelulusan sertifikasi pada periode berikutnya.

3. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan *Peningkatan Produktivitas melalui Pelatihan bagi Pelaku Usaha dan Industri* dilaksanakan oleh Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari di wilayah Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, efisiensi kerja, dan daya saing pelaku usaha sehingga berdampak pada peningkatan mutu kehidupan masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2025, target yang ditetapkan sebanyak 1 kegiatan. Berdasarkan hasil pelaksanaan, kegiatan peningkatan produktivitas telah



dilaksanakan seluruhnya dengan realisasi 1 kegiatan atau sebesar 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan didukung oleh partisipasi aktif pelaku usaha dan industri serta kesesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan peningkatan produktivitas. Ke depan, kegiatan serupa perlu terus dikembangkan dengan jangkauan peserta yang lebih luas dan materi yang lebih aplikatif guna meningkatkan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

4. Terlaksananya Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Dukungan Manajemen pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas terbagi ke dalam beberapa Klasifikasi Rincian Output (KRO), yaitu Layanan Dukungan Manajemen Internal dan Layanan Manajemen Kinerja Internal.

KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi beberapa Rincian Output (RO), antara lain Layanan Data dan Informasi serta Layanan Perkantoran. Sementara itu, KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal mencakup RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi, Layanan Manajemen Keuangan, dan Layanan Reformasi Kinerja.

Pada Tahun Anggaran 2025, target yang ditetapkan sebanyak 5 layanan, dan seluruhnya dapat direalisasikan dengan capaian 5 layanan atau sebesar 100 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan dukungan manajemen telah berjalan optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

BPVP KENDARI
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

**PELATIHAN
VOKASI**

BAB I

PENDAHULUAN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan berdaya saing menjadi faktor penentu dalam meningkatkan daya saing bangsa, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat ketahanan sosial. Dalam konteks tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker) terus memperkuat perannya melalui pengembangan kebijakan dan program strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas tenaga kerja dan produktivitas nasional.

Salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan kebijakan tersebut adalah optimalisasi peran Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) dengan pendekatan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK). BPVP berfungsi sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pelatihan vokasi yang terstandar, relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika pasar kerja. BPVP Kendari, sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Ketenagakerjaan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, memiliki peran strategis dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan siap kerja sesuai dengan potensi dan kebutuhan pasar kerja daerah.

Tantangan ketenagakerjaan yang dihadapi saat ini semakin kompleks, seiring dengan percepatan transformasi digital, perkembangan teknologi industri, perubahan struktur ekonomi, serta dinamika global yang berdampak langsung terhadap pasar kerja nasional. Permasalahan ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri (*skill mismatch*), rendahnya produktivitas tenaga kerja di beberapa sektor, serta ketimpangan kesempatan kerja antarwilayah dan kelompok masyarakat masih menjadi isu utama yang perlu ditangani secara

sistematis dan berkelanjutan. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem pelatihan vokasi yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata dunia kerja.

Tahun 2025 menjadi momentum strategis karena merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, sekaligus menjadi fase awal dalam meletakkan fondasi menuju terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045. Dalam RPJMN tersebut, pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas nasional, serta penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan. Oleh karena itu, penguatan sistem pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja menjadi agenda prioritas yang harus dilaksanakan secara terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan dunia industri.

Sejalan dengan arah pembangunan nasional tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan Visi Pembangunan Ketenagakerjaan, yaitu *“Terwujudnya ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, inklusif, produktif, dan berkeadilan menuju Indonesia Emas 2045.”* Visi ini menjadi landasan utama dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025–2029, yang menekankan penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan tata kelola ketenagakerjaan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Arah kebijakan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025–2029 difokuskan pada pengembangan ekosistem ketenagakerjaan yang responsif terhadap perubahan ekonomi dan teknologi. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui peningkatan relevansi dan kualitas pelatihan vokasi, penguatan sistem informasi pasar kerja, peningkatan kualitas serta perlindungan tenaga kerja, termasuk pekerja migran Indonesia, serta penguatan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan. Dalam konteks ini, BPVP Kendari berperan penting sebagai pelaksana kebijakan di tingkat operasional melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi dan

peningkatan produktivitas tenaga kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja regional Sulawesi Tenggara.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kewajiban tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menegaskan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan instrumen pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPVP Kendari bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif, transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai capaian kinerja selama tahun anggaran berjalan. Laporan ini memuat informasi mengenai perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, capaian indikator kinerja, penggunaan anggaran, serta analisis terhadap tingkat keberhasilan dan kendala yang dihadapi. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, LKjIP juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian kinerja yang menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

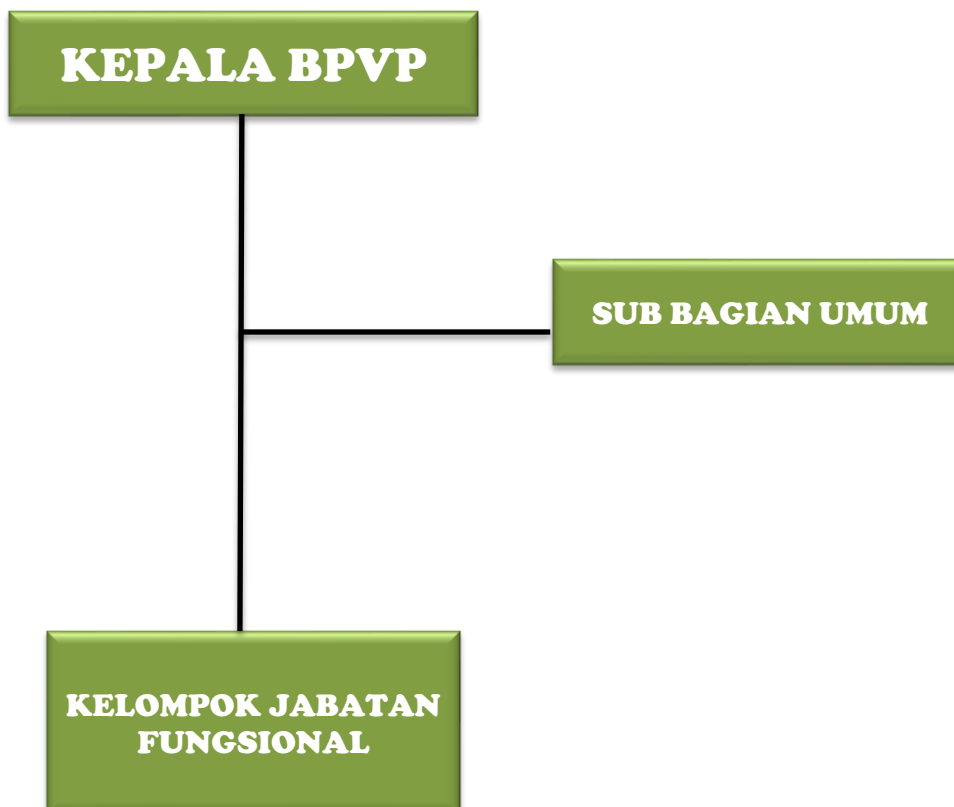
Dengan demikian, penyusunan LKjIP BPVP Kendari merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan penguatan akuntabilitas kinerja, sekaligus sebagai wujud komitmen BPVP Kendari dalam mendukung pencapaian visi dan arah kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025–2029 menuju terwujudnya ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, inklusif, produktif, dan berkeadilan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. BPVP Kendari merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) eselon III/a yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sulawesi Tenggara.

Adapun struktur organisasi BPVP Kendari adalah sebagai berikut:

Gambar 1. 1
Struktur Organisasi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari



TABEL 1. 1.
DATA PEGAWAI BPVP KENDARI

Jumlah PNS Berdasarkan Golongan per Bagian BPVP Kendari

NO	KELOMPOK SUBSTANSI	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1.	Kepala BPVP	-	-	-	1	1
2.	Subbagian Umum	-	-	4	1	5
3.	Sub Koordinator Penyelenggaraan	-	-	3	-	3
4.	Sub Koordinator Pemberdayaan	-	-	2	1	3
5.	Sub Koordinator Produktivitas	-	-	1	1	2
6.	Instruktur Kej. Bisnis Manajemen	-	-	5	-	5
7.	Instruktur Kej. Teknik Elektronika	-	-	3	-	3
8.	Instruktur Kej. Teknik Las	-	-	1	-	1
9.	Intruktur Kej. Garmen Apparel	-	-	1	-	1
10.	Instruktur Kej. Teknik Listrik	-	-	2	-	2
11.	Instruktur Kej. Tata Kecantikan	-	-	1	1	2
12.	Instruktur Kej. Teknologi Informasi & Komunikasi	-	-	2	-	2
13.	Instruktur Kej. Processing	-	-	1	-	1
14.	Instruktur Kej. Teknik Otomotif	-	-	3	1	4
15.	Instruktur Kej. Pariwisata	-	-	2	-	2
16.	Instruktur Kej. Bangunan	-	-	2	-	2
17.	Instruktur Kej. Manufaktur	-	-	0	-	0
18.	Instruktur Kej. Refrigerasi	-	-	0	-	0
19.	Instruktur Produktivitas	-	-	6	1	7
20.	Arsiparis	-	-	3	-	3
21.	Pengantar Kerja	-	-	1	-	1
22.	Analisis SDM dan Aparatur	-	-	1	-	1
23.	Pengelola Keuangan APBN	-	-	3	-	3
24.	Penata Laksana Barang	-	-	1	-	1
Jumlah		-	-	48	7	55

Pegawai Negeri Sipil Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari berjumlah total 55 orang dengan klasifikasi Pejabat Struktural 2 orang yang terdiri dari Kepala BPVP Kendari dan Kepala Sub Bagian Umum, sub Koordinator 3 orang Sub Koordinator Pengukuran Produktivitas, Sub Koordinator Penyelenggaraan, Sub Koordinator Pemberdayaan. Staf berjumlah 11 orang, dan Instruktur kejuruan berjumlah 39 orang.

Pegawai Negeri Sipil pada Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari berjumlah 55 orang. Komposisi pegawai tersebut terdiri atas 2 orang Pejabat Struktural, yaitu Kepala BPVP Kendari dan Kepala Subbagian Umum, serta 3 orang Subkoordinator yang meliputi Sub Koordinator Penyelenggaraan, Sub Koordinator Pemberdayaan, dan Sub Koordinator Pengukuran Produktivitas.

Berdasarkan golongan, seluruh PNS BPVP Kendari berada pada Golongan III dan IV, dengan rincian sebanyak 48 orang pada Golongan III dan 7 orang pada Golongan IV. Kepala BPVP Kendari berada pada Golongan IV, sementara Subbagian Umum didukung oleh 5 orang pegawai yang terdiri dari 4 orang Golongan III dan 1 orang Golongan IV.

Selain itu, BPVP Kendari didukung oleh tenaga fungsional instruktur yang tersebar pada berbagai kejuruan, antara lain Bisnis Manajemen, Teknik Elektronika, Teknik Las, Garmen Apparel, Teknik Listrik, Tata Kecantikan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Processing, Teknik Otomotif, Pariwisata, Bangunan, serta Produktivitas, dengan jumlah keseluruhan instruktur sebanyak 41 orang. Adapun kejuruan Manufaktur dan Refrigerasi saat ini belum memiliki instruktur.

Di samping tenaga instruktur, BPVP Kendari juga didukung oleh jabatan fungsional lainnya, seperti Arsiparis, Pengantar Kerja, Analis SDM dan Aparatur, Pengelola Keuangan APBN, serta Penata Laksana Barang, yang berperan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Keseluruhan komposisi pegawai tersebut menjadi

modal penting dalam mendukung pelaksanaan program pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas di wilayah kerja BPVP Kendari.

Tabel 1. 2

Komposisi PPPK BPVP Kendari Menurut Sub Kelompok Jabatan dan Jenjang Pendidikan

NO	KELOMPOK SUBSTANSI	Pendidikan				JUMLAH
		SMA/SMK	D3	S1	S2	
1.	Pengantar Kerja – Ahli Pertama	-		2	-	2
2.	Instruktur – Ahli Pertama			3	-	3
3.	Pranata Komputer – Ahli Pertama	-	-	2	-	2
4.	Pranata Komputer – Terampil	-	2	-	-	2
5.	Pengadministrasi Perkantoran	2	-	-	-	2
6.	Penata Layanan Operasional	-	-	16	2	18
Jumlah		2	2	23	2	29

Tabel 1. 3.

Komposisi PPNPN BPVP Kendari Menurut Sub Kelompok Jabatan dan Jenjang Pendidikan

NO	KELOMPOK SUBSTANSI	Pendidikan				JUMLAH
		SMA/SMK	D3	S1	S2	
1.	Cleaning Service	3	-	-	-	3
2.	Pengemudi	1	-	-	-	1
3.	Satpam	5	-	1	-	6
Jumlah		9	-	1	-	10

Tabel 1. 4.

Komposisi ASN BPVP Kendari Berdasarkan Golongan

No.	PNS			PPPK			Jenis Kelamin		
	II	III	IV	V	VII	IX	L	P	JML
1	2	47	6	2	2	25	57	27	84

Komposisi ASN BPVP Kendari Menurut Golongan menunjukkan bahwa jumlah ASN sebanyak 84 orang, yang terdiri atas PNS dan PPPK. Berdasarkan golongan, ASN didominasi oleh Golongan III sebanyak 47 orang, diikuti Golongan IX sebanyak 25 orang, Golongan IV sebanyak 6 orang, Golongan II sebanyak 2 orang, Golongan V sebanyak 2 orang, dan

Golongan VII sebanyak 2 orang. Ditinjau dari jenis kelamin, terdapat 57 pegawai laki-laki dan 27 pegawai perempuan, yang mencerminkan komposisi ASN BPVP Kendari berdasarkan golongan dan gender.

Tabel 1. 5.
Komposisi ASN BPVP Kendari Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	ASN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN				
		SMA	D1-D3	DIV/S1	S2	S3
1	PNS	1	2	45	7	0
2	PPPK	2	2	23	2	0

Komposisi ASN BPVP Kendari Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar ASN memiliki kualifikasi pendidikan DIV/S1. Pada kelompok PNS, terdapat 45 orang berpendidikan DIV/S1, 7 orang berpendidikan S2, 2 orang berpendidikan D1–D3, dan 1 orang berpendidikan SMA, serta tidak terdapat PNS dengan kualifikasi S3. Sementara itu, pada kelompok PPPK, terdapat 23 orang berpendidikan DIV/S1, 2 orang berpendidikan S2, 2 orang berpendidikan D1–D3, dan 2 orang berpendidikan SMA, serta tidak terdapat PPPK dengan kualifikasi S3. Komposisi ini mencerminkan bahwa ASN BPVP Kendari didominasi oleh pegawai dengan pendidikan tinggi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

a) Kedudukan

Pada tahun 2025, BPVP Kendari dipimpin oleh Kepala Balai setingkat eselon III/a yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

b) Tugas

Sebagai Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I, BPVP Kendari mempunyai tugas utama melaksanakan pelatihan,

pemberdayaan, dan uji kompetensi tenaga kerja dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.

c) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) menyelenggarakan fungsi :

- ✓ Penyusunan Rencana, Program, dan Anggaran;
- ✓ Penyusunan bahan pelatihan, pemberdayaan, dan uji kompetensi tenaga kerja;
- ✓ Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja;
- ✓ Pelaksanaan Pelayanan konsultasi, pemasaran, dan kerja sama kelembagaan pelatihan;
- ✓ Pelaksanaan Uji Kompetensi tenaga kerja;
- ✓ Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelatihan, pemberdayaan, dan uji kompetensi tenaga kerja;
- ✓ Pengelolaan data dan informasi di bidang pelatihan, pemberdayaan, dan uji kompetensi tenaga kerja; dan
- ✓ Pelaksanaan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga.

C. PERAN STRATEGIS BIDANG PELATIHAN VOKASI

Dari sisi kualitas tenaga kerja, rendahnya tingkat pendidikan dan produktivitas pekerja masih menjadi hambatan utama dalam penciptaan usaha baru serta masuknya investasi. Struktur tenaga kerja ke depan diperkirakan masih didominasi oleh pekerja berpendidikan rendah dengan kompetensi yang terbatas. Kondisi tersebut berpotensi menghambat upaya peningkatan daya saing nasional, khususnya dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat.

Sehubungan dengan kondisi ketenagakerjaan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja, salah satunya melalui penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP).

Untuk mendukung pelaksanaan pelatihan yang berkualitas, dilakukan pengembangan standar kompetensi kerja, revitalisasi lembaga pelatihan melalui penyediaan sarana dan prasarana, serta peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan. Selain itu, guna menjamin mutu dan pengakuan kompetensi tenaga kerja, dilaksanakan sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Upaya pengurangan tingkat pengangguran yang cenderung meningkat setiap tahun, baik dari angkatan kerja baru lulusan pendidikan formal maupun pencari kerja yang belum memperoleh kesempatan kerja akibat keterbatasan keterampilan, menjadi salah satu fokus utama pembangunan ketenagakerjaan nasional. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) berperan aktif dalam menyediakan pelatihan kerja secara gratis bagi masyarakat pencari kerja.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis, BPVP memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai pelaksana pelatihan vokasi bagi tenaga kerja serta sebagai unit percontohan (role model) penyelenggaraan pelatihan vokasi bagi lembaga pelatihan lainnya, baik pemerintah, swasta, maupun dunia usaha dan industri. Keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi kebutuhan mendesak di tengah persaingan tenaga kerja global. Oleh karena itu, BPVP hadir untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum bekerja agar memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, serta bagi pekerja yang telah bekerja untuk meningkatkan kompetensi dan daya saingnya.

Sejalan dengan kebijakan transformasi pelatihan vokasi, BPVP menerapkan kebijakan akses pelatihan yang lebih inklusif. Persyaratan pendidikan formal dan batasan usia yang sebelumnya diberlakukan telah disederhanakan, sehingga pelatihan BPVP dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang pendidikan maupun

usia. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi perluasan jangkauan layanan dan peningkatan kualitas pelatihan vokasi.

Dalam rangka meningkatkan mutu dan relevansi pelatihan, Kementerian Ketenagakerjaan terus mendorong penguatan BPVP melalui tiga strategi utama, yaitu revitalisasi, reorientasi, dan rebranding. Reorientasi dilakukan dengan menetapkan sektor dan profesi prioritas yang selaras dengan kebutuhan industri. Revitalisasi difokuskan pada peningkatan sarana, prasarana, serta kualitas penyelenggaraan pelatihan agar lulusan BPVP mampu memenuhi tuntutan dunia kerja. Sementara itu, rebranding bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPVP sebagai lembaga pelatihan vokasi yang modern, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan industri.

Dengan peran strategis tersebut, BPVP diharapkan mampu menjadi instrumen pengembangan sumber daya manusia yang efektif dalam mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja produktif, sehingga dapat mendukung peningkatan kesempatan kerja serta daya saing tenaga kerja nasional.

D. ISU STRATEGIS BIDANG PELATIHAN VOKASI

Isu strategis ketenagakerjaan Indonesia pada tahun 2025 diarahkan pada penguatan resiliensi tenaga kerja dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global serta percepatan transformasi digital. Fokus utama kebijakan ketenagakerjaan adalah menekan angka pengangguran terbuka yang diproyeksikan berada pada kisaran 5 persen melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, khususnya di sektor manufaktur dan ekonomi hijau (green jobs). Kebijakan tersebut didukung dengan penguatan perlindungan sosial bagi pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui peningkatan manfaat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Selain itu, pemerintah mendorong reformasi pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri guna mengatasi ketidakcocokan keterampilan (skill mismatch) serta mempercepat transisi

tenaga kerja dari sektor informal ke sektor formal dalam rangka meningkatkan produktivitas nasional dan keberlanjutan jaminan sosial.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, pemerintah memfokuskan penguatan ekosistem pelatihan vokasi nasional agar lebih adaptif terhadap dinamika pasar kerja yang semakin kompetitif. Sejalan dengan transformasi kelembagaan dari *Ministry of Labor menuju Ministry of Manpower and Human Development*, kebijakan pelatihan vokasi diarahkan pada penguatan program strategis, antara lain Project Based Learning (PBL) berskala nasional serta perluasan program pemagangan sebagai instrumen utama dalam menutup kesenjangan keterampilan (*skill gap*).

Project Based Learning merupakan pendekatan pelatihan vokasi berbasis proyek yang dirancang untuk meningkatkan kesiapan kerja peserta dalam menghadapi tantangan *future of work* melalui penguasaan kompetensi yang relevan dan terukur. Pelaksanaan PBL menekankan keterlibatan aktif peserta dalam penyelesaian proyek nyata yang merepresentasikan permasalahan dan kebutuhan dunia kerja. Sektor prioritas dalam implementasi PBL difokuskan pada smart sector yang memanfaatkan sistem cerdas (*smart system*), seperti *smart operation*, *smart creative skill*, serta sektor inovatif lainnya.

Selain itu, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Ditjen Binalavotas) turut mendukung program unggulan pemerintah berupa Pemagangan Nasional bagi 100.000 lulusan perguruan tinggi (*fresh graduate*). Program pemagangan dilaksanakan selama enam bulan dengan pemberian uang saku setara Upah Minimum Kabupaten/Kota serta perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, sebagai upaya mempercepat penyerapan tenaga kerja terdidik ke dunia usaha dan industri.

Tingkat pengangguran di Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Tenggara, masih menunjukkan kecenderungan meningkat seiring

bertambahnya angkatan kerja baru dari lulusan pendidikan formal serta pencari kerja yang belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Menyikapi kondisi tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan melalui BPVP Kendari berperan strategis dalam menyediakan layanan pelatihan vokasi secara gratis guna membekali masyarakat dengan keterampilan yang relevan serta meningkatkan daya saing tenaga kerja.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis, BPVP Kendari memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai pelaksana pelatihan vokasi bagi tenaga kerja serta sebagai unit percontohan (role model) bagi lembaga pelatihan lainnya, baik pemerintah, swasta, maupun dunia usaha dan industri. Pendekatan pelatihan vokasi yang menitikberatkan pada praktik kerja bertujuan untuk membentuk kompetensi peserta secara utuh, mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan etos kerja, sehingga lulusan memiliki kesiapan yang lebih baik dalam memasuki dunia kerja.

Sejak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), persaingan tenaga kerja di tingkat regional semakin ketat. Dalam merespons kondisi tersebut, BPVP Kendari menerapkan kebijakan pelatihan yang inklusif dengan membuka akses pelatihan tanpa batasan pendidikan formal maupun usia. Strategi peningkatan mutu penyelenggaraan pelatihan dilaksanakan melalui tiga pilar utama, yaitu reorientasi, revitalisasi, dan rebranding. Reorientasi diarahkan pada penetapan sektor dan profesi prioritas sesuai kebutuhan industri, revitalisasi difokuskan pada peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan penyelenggaraan pelatihan, sedangkan rebranding bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPVP sebagai lembaga pelatihan vokasi yang modern, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan pasar kerja.

Dengan penerapan strategi tersebut, BPVP Kendari diharapkan mampu berperan sebagai instrumen pengembangan sumber daya manusia yang efektif dalam mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan

etos kerja produktif. Melalui pelatihan vokasi yang relevan dan berkualitas, masyarakat pencari kerja memperoleh kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja, sementara tenaga kerja yang telah bekerja dapat meningkatkan kapasitas dan daya saingnya, sehingga mendukung terwujudnya tenaga kerja yang kompeten dan mampu bersaing di tingkat regional maupun global.

Sejalan dengan upaya tersebut, BPVP Kendari berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan relevansi pelatihan vokasi sebagai bagian dari penguatan ekosistem ketenagakerjaan nasional. Dalam rangka mendukung visi Indonesia Emas 2045, diperlukan tenaga kerja yang kompeten, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan melalui BPVP Kendari secara berkelanjutan mendorong penyelenggaraan pelatihan vokasi yang adaptif dan inovatif serta memperkuat kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk melalui pemberian apresiasi terhadap kinerja dan kontribusi terbaik, guna mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

BPVP KENDARI
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

**PELATIHAN
VOKASI**

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

2025

BAB II

PERENCANAAN

A. Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan

A.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Ketenagakerjaan

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan selaras dan mendukung agenda, sasaran dan arah kebijakan pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan wilayah, serta pembangunan bidang aparatur Negara. Arah kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan ditujukan dalam rangka mewujudkan “Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi Yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada tahun 2025 pada prinsipnya merupakan kelanjutan dari program strategis 9 Lompatan Besar Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2020–2024, yang selanjutnya diperkuat melalui pencaanangan Arah Kebijakan Ketenagakerjaan Kabinet Merah Putih, sebagai langkah akseleratif dalam mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tertuang dalam Asta Cita, khususnya pada aspek penguatan sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Kebijakan ini dirumuskan untuk menjawab kompleksitas tantangan pembangunan ketenagakerjaan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki serta melakukan perbaikan terhadap berbagai kelemahan, sehingga Menteri Ketenagakerjaan menetapkan arah kebijakan dan agenda pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana tercermin dalam sembilan lompatan besar yang dirinci pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1.

kebijakan dan Agenda

Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020 – 2024

NO	LOMPATAN	ARAH KEBIJAKAN	AGENDA
1	Transformasi BPVP	Mengubah secara total BPVP sebagai Balai Pelatihan Vokasi	Reformasi kelembagaan untuk meningkatkan kinerja organisasi BPVP yang

NO	LOMPATAN	ARAH KEBIJAKAN	AGENDA
		yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional	<p>lebih inovatif dan transformatif</p> <p>Revitalisasi sarana dan prasarana untuk meningkatkan kapasitas, fasilitas, dan keterjangkauan BPVP</p> <p>Redesain pelatihan untuk merespon tantangan ketenagakerjaan lokal, nasional, dan internasional</p> <p><i>Relationship</i> untuk meningkatkan kemitraan dan kolaborasi dengan stakeholders dalam rangka memperkuat kinerja BPVP</p> <p><i>Rebranding</i> untuk meningkatkan daya tarik dan kepercayaan publik terhadap BPVP</p> <p>Reorientasi SDM BPVP untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan BPVP</p>
2	Link and Match Ketenagakerjaan	Membangun integrasi, pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja dalam sebuah bisnis proses yang utuh dan efektif untuk mempertemukan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja	<p>Pengembangan sistem integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan</p> <p>Penguatan kelembagaan pelayanan pasar kerja lintas-sektor dan unit</p> <p>Penguatan SDM pelatihan, sertifikasi, dan penempatan</p> <p>Penguatan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja</p> <p>Digitalisasi pelayanan pasar kerja</p> <p>Pengembangan kemitraan dan kolaborasi dengan stakeholders</p>
3	Transformasi Program Perluasan Kesempatan Kerja	Mengembangkan program tenaga kerja mandiri yang efektif untuk membentuk tenaga kerja mandiri dalam rangka memperluas kesempatan kerja yang terukur dan berkelanjutan	<p>Penyusunan desain baru tenaga kerja mandiri</p> <p>Pengembangan sistem pengelolaan program tenaga kerja mandiri</p> <p>Penguatan kelembagaan pelaksana program tenaga kerja mandiri</p> <p>Pengembangan jaringan kemitraan tenaga kerja mandiri</p>
4	Pengembangan Talenta Muda	Mengembangkan dan mengelola potensi kreatif generasi milenial menjadi talenta muda yang siap menyambut <i>future job</i> yang dinamis dan fleksibel	<p>Transformasi <i>Innovation Room</i> menjadi <i>Talent Hub</i></p> <p>Pengembangan kompetensi talenta muda</p> <p>Perluasan kesempatan kerja untuk talenta muda</p> <p>Pembentukan <i>Talent Corner</i> di BPVP UPTP</p>

NO	LOMPATAN	ARAH KEBIJAKAN	AGENDA
			<i>Talent Scouting</i> Inovator Muda
5	Perluasan Pasar Kerja Luar Negeri	Mengembangkan pasar kerja luar negeri dengan memperluas negara penempatan Pekerja Migran Indonesia sektor formal dan memasifikasi pengisian jabatan di sektor formal	<p>Pengembangan sistem market intelligence di negara-negara sasaran PMI</p> <p>Perluasan negara-negara penempatan PMI sektor formal, termasuk implementasi <i>Specified Skill Worker (SSW)</i></p> <p>Pengembangan sistem manajemen PMI berbasis digital yang terintegrasi dengan SIAPkerja dan KIK</p> <p>Pembenahan standar kompetensi PMI dan proses pelaksanaannya</p> <p>Peningkatan kompetensi CPMI, baik melalui pelatihan luring maupun daring</p> <p>Penguatan perlindungan hak-hak PMI</p>
6	Visi Baru Hubungan Industrial	Mengembangkan hubungan industrial yang lebih berkualitas dan adil serta berorientasi pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja secara berkelanjutan	<p>Pengembangan inovasi program dalam rangka implementasi UU Cipta Kerja dan aturan turunannya</p> <p>Reformasi sistem pengupahan</p> <p>Peningkatan harmonitas hubungan dengan SP/SB yang lebih berkualitas</p> <p>Penerapan pola hubungan kerja yang adaptif terhadap pasar kerja yang fleksibel</p> <p>Penguatan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit dan Tripartit</p>
7	Reformasi Pengawasan Ketenagakerjaan	Meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem pengawasan ketenagakerjaan yang dapat menjamin pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dan K3 yang berintegritas dan kredibel	<p>Penyusunan rencana kerja bidang pengawasan ketenagakerjaan dan layanan K3</p> <p>Pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan yang transparan dan akuntabel</p> <p>Penguatan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan dan K3</p> <p>Pengembangan pelaksanaan pengujian K3</p> <p>Peningkatan kapasitas dan integritas SDM pengawasan ketenagakerjaan dan K3</p> <p>Pengembangan kolaborasi pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dan layanan K3</p> <p>Pengembangan mekanisme audit kinerja pengawasan</p>

NO	LOMPATAN	ARAH KEBIJAKAN	AGENDA
			Penguatan penegakan hukum (<i>law enforcement</i>) ketenagakerjaan
8	Pengembangan Ekosistem Digital Ketenagakerjaan	Mengembangkan sistem informasi dan pelayanan ketenagakerjaan sebagai ekosistem digital ketenagakerjaan terbesar di Indonesia	<p>Transformasi SISNAKER menjadi Sistem Informasi dan Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPkerja)</p> <p>Integrasi seluruh pelayanan di Kementerian Ketenagakerjaan ke dalam SIAPkerja</p> <p>Pengembangan SIAPkerja sebagai instrumen bagi pembangunan big data untuk mengimplementasikan Satu Data Ketenagakerjaan</p> <p>Penguatan tata kelola SIAPkerja yang kapabel dan efektif</p> <p>Pengembangan infrastruktur dan sistem SIAPkerja yang memadai Sinergi platform digital swasta yang bergerak dalam bidang ketenagakerjaan, pelatihan, penempatan, dan platform terkait lainnya ke dalam ekosistem SIAPkerja.</p>
9	Reformasi Birokrasi	Mengembangkan birokrasi yang bersih, akuntabel, profesional, lincah, inovatif, dan responsif untuk mencapai kinerja maksimal dan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima	<p>Manajemen perubahan</p> <p>Deregulasi Kebijakan/Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>Penataan organisasi</p> <p>Penataan tata laksana dan pengembangan E Government</p> <p>Penataan sumber daya manusia aparatur</p> <p>Penguatan akuntabilitas</p> <p>Penguatan pengawasan</p> <p>Peningkatan kualitas pelayanan publik</p>

Dalam RPJMN 2025-2029, Kementerian Ketenagakerjaan menjadi salah satu instansi yang menjadi pelaksana Prioritas Nasional 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, yaitu:

- Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
- Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

- Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
- Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Prioritas Nasional 5 (lima) menitikberatkan pada hilirisasi Sumber Daya Alam unggulan, industri padat karya terampil, industri padat teknologi inovasi, industri dasar, dan pengembangan Kawasan.
- Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
- Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, yang menasar terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak.

Arah kebijakan strategis Kementerian Ketenagakerjaan yang mengedepankan beberapa prinsip dan pendekatan kunci yang juga merupakan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Merumuskan Kebijakan Ketenagakerjaan Berbasis Riset dan Data (Research-based Policy);
2. Membangun Kolaborasi Lintas Sektor;
3. Membangun Layanan Ketenagakerjaan Berbasis Citizen-Centric dan Employment Journey;
4. Mewujudkan Transformasi Berbasis Digital;
5. Memperkuat Kapasitas SDM Kementerian dan Layanan Inklusif;
6. Mewujudkan Transformasi Pelatihan;
7. Menggalakkan Gerakan Peningkatan Produktivitas Nasional dan Daya Saing;

A.2. Target Kinerja

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan tahun

2020-2024, Kementerian Ketenagakerjaan akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, kebijakan dan strategi serta struktur organisasi Kementerian Ketenagakerjaan. Sasaran strategis Kementerian Ketenagakerjaan 2020-2024 yaitu: Terwujudnya tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah, produktif dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Tabel 2. 2.

Target Kinerja Kementerian Ketenagakerjaan
Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
Berdasarkan Renstra 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
<u>Kementerian Ketenagakerjaan</u>						
	Sasaran Strategis : Terwujudnya tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah, produktif dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong					
	- IKSS : Kontribusi terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Nasional	n/a	3,03%	5,55%	7,19%	9,85%
	Sasaran Strategis : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik					
	- IKSS : Indeks Reformasi Birokrasi	75.50	81.00	82.00	83.00	85.00
	- IKSS : Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	- IKSS : Indeks SPBE	3,29	3,39	3,52	4,0	4,0
<u>1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</u>						
	Sasaran Program : Meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator		Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
	-	IKP : Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan Ditempatkan	n/a	65%	68%	72%	75%
	-	IKP : Jumlah tenaga kerja berkeahlian menengah - tinggi di sektor prioritas yang mendorong daya saing	n/a	10.200 Orang	11.220 Orang	12.350 Orang	13.600 Orang
	-	IKP : Jumlah tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	n/a	304.058 Orang	1.189.55 0 Orang	1.546.370 Orang	2.164.920 Orang
Kegiatan 1 : Pengembangan standar kompetensi dan program pelatihan vokasi							
Tersedianya standar kompetensi tenaga kerja, program, materi dan metode pelatihan vokasi							
	-	Jumlah Standar Kompetensi Kerja yang disusun dan ditetapkan	150 SKK	150 SKK	150 SKK	150 SKK	150 SKK
	-	Persentase Program dan materi pelatihan yang berkaitan dengan Tenaga Kerja Berkeahlian tinggi yang mendorong daya saing	n/a	20%	50%	75%	100%
Kegiatan 2 : Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan pelatihan vokasi dan produktivitas							
Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan pelatihan vokasi dan produktivitas							
	-	Jumlah BPVP Pemerintah yang terakreditasi	n/a	100 BPVP	125 BPVP	140 BPVP	160 BPVP
	-	Jumlah BPVP Komunitas yang diakreditasi	n/a	97 BPVP Komunitas	100 BPVP Komunitas	200 BPVP Komunitas	200 BPVP Komunitas
	-	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi	n/a	150 LPK	150 LPK	150 LPK	150 LPK
	-	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dikembangkan menjadi Balai Pelatihan Profesional berstandar Internasional	n/a	5 BPVP	5 BPVP	4 BPVP	4 BPVP

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
-	Jumlah pembangunan Balai UPTP Baru	n/a	6 BPVP	5 BPVP	4 BPVP	4 BPVP
-	Jumlah pembangunan Workshop Pelatihan Kerja	n/a	4 Workshop	4 Workshop	4 Workshop	3 Workshop
	Jumlah Lembaga pelatihan kerja dan produktivitas yang ditingkatkan sarana dan prasarana	n/a	300 Lembaga	550 Lembaga	550 Lembaga	550 Lembaga
	Jumlah Pembangunan BPVP Komunitas	1014 BPVP Komunitas	1000 BPVP Komunitas	1500 BPVP Komunitas	2000 BPVP Komunitas	2500 BPVP Komunitas
	Jumlah Talent Corner yang ada pada BPVP UPTP	n/a	7 Talent Corner	8 Talent Corner	9 Talent Corner	10 Talent Corner

Kegiatan 3 : Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan

Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan vokasi dan pemagangan yang Berkualitas

-	Jumlah Peserta pemagangan dalam negeri	16.055 Orang	53.050 Orang	55.000 Orang	75.000 Orang	100.000 Orang
-	Jumlah Peserta pemagangan luar negeri	3.420 Orang	2.000 Orang	4.000 Orang	6.000O rang	6.500 Orang
-	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	159.010 Orang	158.558 Orang	250.000 Orang	350.000 Orang	500.000 Orang
-	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi yang berkaitan dengan keahlian menengah tinggi yang mendorong daya saing.	n/a	10.200 Orang	11.220 Orang	12.350 Orang	13.600 Orang
-	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	576Orang	3.008 Orang	10.000 Orang	50.000 Orang	100.000 Orang

Kegiatan 4 : Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

Meningkatnya produktivitas tenaga kerja

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator		Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
-	Jumlah tenaga kerja yang meningkat produktivitasnya		n/a	304.058 Orang	1.189.550 Orang	1.546.370 Orang	2.164.920 Orang
Kegiatan 5 : Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Keahlian							
Meningkatnya Kompetensi Instruktur dan Tenaga Keahlian							
-	Persentase Instruktur yang ditingkatkan kompetensinya		n/a	20%	30%	40%	50%
-	Persentase Instruktur yang berkinerja tinggi		n/a	60%	65%	70%	75%
-	Persentase tenaga pelatihan yang ditingkatkan kompetensinya		n/a	20%	30%	40%	50%
-	Persentase tenaga pelatihan yang berkinerja tinggi		n/a	60%	65%	70%	75%
Kegiatan 6 : Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi							
Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi Kerja							
-	Persentase tenaga kerja yang disertifikasi dan bekerja sesuai sertifikat kompetensinya		n/a	10%	15%	20%	25%
-	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi sesuai keahlian menengah -tinggi yang mendorong daya saing.		n/a	10.200 Orang	11.220 Orang	12.350 Orang	13.600 Orang
-	Tingkat maturitas Layanan Publik berbasis elektronik untuk BNSP		4	4	4	4	4
2. Program Dukungan Manajemen Internal							
Sasaran Program : Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas							
-	Indeks PMPRB		76	35,05	35,35	35,65	35,95
-	Presentase Temuan yang ditindaklanjuti		65%	70%	75%	80%	85%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator		Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
	-	Nilai evaluasi SAKIP	83	84	85	86	87
	-	Tingkat maturitas Layanan Publik Instansi Pemerintah	3	3	3	4	4
Kegiatan 7 : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PembinaanPelatihan Vokasi dan Produktivitas							
Meningkatnya dukungan dan manajemen teknis							
	-	Indeks PMPRB	76	35,05	35,35	35,65	35,95
	-	Presentase Temuan yang Ditindaklanjuti	65%	70%	75%	80%	85%
	-	Nilai evaluasi SAKIP	83	84	85	86	87
	-	Tingkat maturitas Layanan Publik Instansi Pemerintah	3	3	3	4	4

Tahun 2025 merupakan masa transisi Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan, Dimana Target kinerja Kementerian Ketenagakerjaan periode 2025-2029 disusun sebagai arahan yang jelas untuk mencapai tujuan jangka menengah (lima tahun). Target kinerja merupakan turunan dari Tujuan dan Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian yang diukur melalui indikator-indikator. Tujuan, Sasaran, dan Indikator yang ingin dicapai kementerian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Meningkatnya kesempatan kerja yang inklusif dan adil serta memperkuat perlindungan, kesejahteraan dan produktivitas pekerja. Tujuan 1 memiliki satu Sasaran Strategis yaitu "Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan". Sasaran Strategis ini diukur dengan satu indikator sasaran strategis yaitu Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK). Berikut merupakan target kinerja IKSS yang pertama IPK

IKSS	Satuan	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Nilai	70,10	70,14	73,66	76,82	80,11	83,58

2. Tujuan 2: Meningkatnya tata kelola Kementerian Ketenagakerjaan yang berkualitas dan bermanfaat. Tujuan 2 memiliki satu Sasaran Strategis yaitu “Meningkatnya tata kelola dan pelayanan publik Kementerian Ketenagakerjaan yang profesional dan berintegritas”. Sasaran strategis ini diukur dengan 1 (satu) indikator, yaitu “Indeks Reformasi Birokrasi”.

Berbagai program yang diinisiasi Kementerian Ketenagakerjaan mencerminkan bidang-bidang utama yang menjadi fokus dari rencana strategis. Setiap program diuraikan dalam bentuk kegiatan yang mendetail, termasuk alokasi anggaran, indikator kinerja, dan jadwal pelaksanaan yang memungkinkan pencapaian target yang lebih besar. Melalui kegiatan-kegiatan ini, Kementerian Ketenagakerjaan dapat lebih efektif dalam menggerakkan sumber daya, berkoordinasi dengan pemangku kepentingan, dan memastikan setiap langkah operasional mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan. Selain itu, penerjemahan target kinerja ke dalam program dan kegiatan memungkinkan adanya sistem pemantauan dan evaluasi yang lebih jelas dan terstruktur. Setiap kegiatan dapat diukur pencapaiannya terhadap target yang telah ditetapkan, sehingga Kementerian Ketenagakerjaan dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan secara cepat. Dengan pendekatan ini, Kementerian Ketenagakerjaan dapat mempertahankan fokus pada target strategisnya, memberikan hasil yang lebih maksimal, dan memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan memberikan dampak yang nyata dan terukur bagi masyarakat. Secara rinci, berikut ini adalah program dan kegiatan yang diagendakan dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan tahun 2025-2029.

Tabel 2. 3.

Target Kinerja Kementerian Ketenagakerjaan
Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
Berdasarkan Renstra 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Kementerian Ketenagakerjaan						
	Sasaran Strategis : Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan					
-	IKSS : Indeks pembangunan ketenagakerjaan	70,14	73,66	76,82	80,11	83,58

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	(nilai)						
Sasaran Strategis : Meningkatnya tata kelola Kementerian Ketenagakerjaan yang profesional dan berintegritas							
-	IKSS : Indeks Reformasi Birokrasi (nilai)		87,50	90,01	92,50	95,00	97,50
1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							
Sasaran Program : Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja							
-	IKP : Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja		n/a	65%	68%	72%	75%
-	IKP : Persentase Lulusan Pelatihan Vokasi Setahun Terakhir yang Bekerja atau Berwirausaha		n/a	10.200 Orang	11.220 Orang	12.350 Orang	13.600 Orang
Kegiatan 1 : Pengembangan Standar Kompetensi dan Program Pelatihan Vokasi Binalavotas							
Tersedianya standar kompetensi kerja dan program pelatihan vokasi							
-	Jumlah Standar Kompetensi Kerja yang disusun dan ditetapkan		80	80	80	80	80
	Jumlah Program Pelatihan Vokasi yang ditetapkan		65	20	38	63	75
	Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) Pekerjaan Hijau/Green Jobs yang Ditetapkan		1	1	1	1	1
Terlaksananya Prestasi talenta muda pada ajang kompetisi keterampilan nasional dan internasional							
-	Persentase prestasi talenta muda yang memperoleh medali pada ajang kompetisi keterampilan nasional dan internasional		70	30	70	30	70
Kegiatan 2 : Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan pelatihan vokasi dan produktivitas Binalavotas							
Menguatnya Lembaga Pelatihan Vokasi							
-	Jumlah Lembaga pelatihan vokasi yang berkerja sama dengan DUDIKA		15	20	20	20	20
-	Jumlah Lembaga Pelatihan Vokasi yang terakreditasi		479	782	1077	1077	1082
	Jumlah Lembaga Pelatihan Vokasi yang dibangun atau dikembangkan		89	207	207	255	255
Kegiatan 3 : Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan vokasi dan pemagangan yang berkualitas						
-	Jumlah tenaga kerja yang dikembangkan kompetensinya	92.471 Orang	108.205 Orang	176.782 Orang	202.972 Orang	279.189 Orang
-	Jumlah Tenaga Kerja yang Dikembangkan Kompetensi Hijau	300.000 Orang	500.000 Orang	700.000 Orang	900.000 Orang	1.100.000 Orang
-	Jumlah lulusan pelatihan vokasi di lembaga pelatihan kerja swasta, BLKK, dan Kementerian/Lembaga	607.529 Orang	591.795 Orang	423.218 Orang	297.028 Orang	120.811 Orang
-	Tingkat Kepuasan Pengguna atas Lulusan Pelatihan Vokasi	0	3,2	3,3	3,4	3,5
-	Jumlah peserta pemagangan dalam dan luar negeri	18.400 Orang	23.550 Orang	28.708 Orang	33.873 Orang	36.647 Orang
	Jumlah Kerja Sama yang Melibatkan asosiasi dan DUDIKA dalam Pengembangan Pekerjaan Hijau/Green Jobs	1	1	1	1	1

Kegiatan 4 : Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Binalavotas

Meningkatnya partisipasi Perusahaan/Lembaga dalam peningkatan produktivitas						
-	Jumlah Perusahaan atau Lembaga yang Berpartisipasi dalam Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (GNP2DS)	501	495	630	765	900
	Jumlah peserta yang meningkat kompetensinya di Bidang Produktivitas.	1.796 Orang	875 Orang	1.310 Orang	1.770 Orang	2.546 Orang

Kegiatan 5 : Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Keahlian Binalavotas

Meningkatnya Kompetensi Instruktur dan Tenaga Keahlian						
-	Jumlah Instruktur yang dikembangkan dan ditingkatkan kompetensinya	3.340 Orang	4.012 Orang	4.764 Orang	5.934 Orang	7.009 Orang
-	Persentase Instruktur yang Berkinerja Tinggi	18%	19%	20%	21%	22%
-	Jumlah tenaga pelatihan yang Dikembangkan dan ditingkatkan kompetensinya	160 Orang	160 Orang	160 Orang	160 Orang	352 Orang

Kegiatan 6 : Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Binalavotas

Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi Kerja						
--	--	--	--	--	--	--

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
-	Jumlah lulusan pelatihan yang mendapatkan sertifikat kompetensi	50.403 Orang	57.457 Orang	67.580 Orang	82.708 Orang	110.165 Orang
-	Jumlah Tenaga kerja yang tersertifikasi kompetensi kerja	25.719 Orang	35.000 Orang	45.000 Orang	50.000 Orang	55.000 Orang

2. Program Dukungan Manajemen Internal

Sasaran Program : Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas						
-	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Binalavotas	90	90,5	91	91,5	92
-	Nilai Evaluasi SAKIP Ditjen Binalavotas	85	85,5	86	86,5	87
-	Tindak Lanjut Temuan Pengawasan dan Pemeriksaan Ditjen Binalavotas	75	76	77	78	79
-	Tingkat Maturitas Layanan Publik Instansi Pemerintah Ditjen Binalavotas/Tingkat Keterpaduan dan Kepuasan Layanan Digital Ketenagakerjaan Ditjen Binalavotas	3,95	2,68	2,68	2,88	2,88
	Persentase Penurunan Temuan Hasil Pemeriksaan Ditjen Binalavotas	0,8	0,7	0,6	0,5	0,2

Kegiatan 7 : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Meningkatnya dukungan dan manajemen teknis						
-	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Binalavotas	90	90,5	91	91,5	92
-	Nilai Evaluasi SAKIP Ditjen Binalavotas	85	85,5	86	86,5	87
-	Nilai Maturitas SPIP Hasil Penjaminan Kualitas	3,90	3,96	3,99	4,02	4,05
-	Tindak Lanjut Temuan Itjen	75	77,5	80	82,5	85
	Tingkat Maturitas Layanan Publik Instansi Pemerintah /Tingkat Keterpaduan dan Kepuasan Layanan Digital Ketenagakerjaan	3,95	2,68	2,68	2,88	2,88

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025–2029, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari memiliki empat Sasaran Program dan lima Indikator Kinerja Program, yang dirinci dalam tabel Perjanjian Kinerja berikut ini

Tabel 2. 4.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Kendari

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Rincian Output	Target
1.	Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	992 Orang	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja	992 Orang
2.	Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan vokasi dan pemagangan yang berkualitas	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	1.840 Orang	PBK UPTP	1.341 Orang
				Pelatihan PFLK	3 Orang
		Koordinasi penyelenggaraan Pelatihan dan Pemagangan bersama industri	1 Kegiatan	Fasilitasi FKLPI	1 Kegiatan
3.	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Binalavotas	Jumlah tenaga kerja yang Meningkatkan Produktivitasnya	1 Kegiatan	Pelatihan Peningkatan Produktivitas	1 Kegiatan
4.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Terlaksananya Layanan Dukungan manajemen Internal	5 Layanan	Layanan Data & Informasi	1 Layanan
				Layanan Perkantoran	1 Layanan
				Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Layanan
				Layanan Manajemen Keuangan	1 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Rincian Output	Target
				Layanan Reformasi Kinerja	1 Layanan

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Rincian Output	Anggaran (Rp)
1.	4053 Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Binalavotas	587.633.000	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja	587.633.000
2.	4057 Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas	6.533.288.000	Fasilitas Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan & Industri	600.000
			PBK UPTP	4.728.869.000
			Pelatihan PFLK	12.000.000
			PBK Provinsi Sulawesi Tenggara	1.791.819.000
3.	4059 Pengembangan & Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Binalavotas	15.398.000	Pelatihan Peningkatan Produktivitas	15.398.000
4.	6988 Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	13.975.255.000	Layanan data & Informasi	200.000.000
			Layanan Perkantoran	13.301.653.000
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	240.000.000
			Layanan Manajemen Keuangan	91.846.000
			Layanan Reformasi Kinerja	141.726.000
Jumlah		21.111.544.000		21.111.544.000



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

BPVP KENDARI
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS



**PELATIHAN
VOKASI**

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

2025

BAB III

AKUNTABILITAS

A. CAPAIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja BPVP Kendari Tahun 2025 berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan seluruh kegiatan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari, yang mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan vokasi dan Produktivitas (Ditjen Binalavotas) Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025–2029. Salah satu fokus penting dalam Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan adalah pengelolaan dan pemanfaatan keberagaman sumber daya hayati sebagai potensi unggulan daerah, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Namun demikian, kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Tenggara masih dihadapkan pada permasalahan rendahnya daya saing tenaga kerja dibandingkan dengan daerah lain. Oleh karena itu, upaya peningkatan daya saing tenaga kerja dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan kerja guna meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) menjadi salah satu strategi utama, dengan indikator kinerja berupa jumlah tenaga kerja yang memperoleh pelatihan berbasis kompetensi.

Tabel 3. 1.

Capaian Kinerja BPVP KENDARI 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Terlaksananya sertifikasi kompetensi kerja	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	992 Orang	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja	992 Orang	1.024 Orang	103,23 %
2.	Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan vokasi dan	Jumlah tenaga kerja yang mendapat	1.840 Orang	PBK UPTP	1.341 Orang	1.312 Orang	97,84 %

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025
	pemagangan yang Berkualitas	pelatihan berbasis kompetensi		Pelatihan PFLK	3 Orang	0 Orang	0,00 %
				PBK Provinsi Sulawesi Tenggara	496 Orang	560 Orang	112,90 %
3.	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Binalavotas	Jumlah tenaga kerja yang meningkatkan produktivitasnya	1 Kegiatan	Pelatihan Peningkatan Produktivitas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %
4.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Terlaksananya Layanan Dukungan manajemen Internal	5 Layanan	Layanan Data & Informasi	1 Layanan	1 Layanan	100,00 %
				Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100,00 %
				Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Layanan	1 Layanan	100,00 %
				Layanan Manajemen Keuangan	1 Unit	1 Layanan	100,00 %
				Layanan Reformasi Kinerja	1 Layanan	1 Layanan	100,00 %

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPVP Kendari pada Tahun 2025 mengacu pada Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan BPVP Kendari dalam mencapai sasaran kinerja tersebut, dilakukan pengukuran dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

BPVP Kendari beserta seluruh jajarannya secara berkelanjutan menyelenggarakan pelatihan bagi angkatan kerja guna memenuhi standar kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, sehingga menghasilkan tenaga kerja yang berdaya saing tinggi, profesional, serta berkarakter

dan berkepribadian baik. Uraian pelaksanaan program dan kegiatan tersebut disajikan sebagai berikut:

A.1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA IKK-1

Jumlah tenaga kerja yang di sertifikasi

a. Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3. 2.

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan 1 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL	TARGET REVISI	REALISASI	CAPAIAN %
Terlaksana sertifikasi kompetensi kerja	976 Orang	992 Orang	1.024 Orang	103.23%

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan 1 Tahun 2025 dilakukan untuk menilai tingkat pencapaian pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini menggambarkan komitmen dalam meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja melalui pelaksanaan sertifikasi kompetensi. Pada awal tahun 2025, target sertifikasi kompetensi kerja ditetapkan sebanyak 976 orang dan selanjutnya mengalami penyesuaian menjadi 992 orang.

Tabel 3. 3.

Data Sertifikasi Tahun 2025

No	Skema	Target		Realisasi			Keterangan		
		Paket	Orang	Paket	Orang	%	Kompeten	Belum Kompeten	% Kompeten
1.	BPVP Kendari	43	688	55	812	118.02%	724	88	89.16%
2.	UPTD BLK Konawe Selatan	5	80	-	-	0%	-	-	0%
3.	UPTD BLK Kolaka	5	80	11	141	176.25%	99	42	70.21%
4.	UPTD BLK Kolaka Utara	3	48	-	-	0%	-	-	0%
5.	UPTD BLK Buton	3	48	3	43	89.58%	27	16	62.79%
6.	UPTD BLK Konawe Utara	3	48	-	-	0%	-	-	0%
7.	Dinas Tenaga Kerja Bau-	-	-	2	28		25	3	89.29%

	Bau								
Jumlah	62	992	71	1024	103,23%	875	149	85,50%	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan pelatihan pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK-1) yang melibatkan BPVP Kendari dan UPTD BLK di wilayah Sulawesi Tenggara menunjukkan capaian kinerja yang bervariasi antarunit pelaksana. Secara keseluruhan, ditetapkan target sebanyak 62 paket pelatihan dengan 992 orang peserta, dan terealisasi sebanyak 71 paket pelatihan dengan 1.024 orang peserta, sehingga capaian kinerja mencapai 103,23% dari target yang telah ditetapkan.

BPVP Kendari sebagai pelaksana utama mencatat capaian tertinggi dengan realisasi 55 paket pelatihan dan 812 orang peserta, atau sebesar 118,02% dari target. Dari jumlah tersebut, tingkat kelulusan peserta yang dinyatakan kompeten mencapai 89,16%. Selanjutnya, UPTD BLK Kolaka menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan realisasi 11 paket pelatihan dan 141 orang peserta, atau 176,25% dari target, dengan persentase peserta kompeten sebesar 70,21%. Sementara itu, UPTD BLK Buton berhasil merealisasikan seluruh target paket pelatihan yang ditetapkan dengan capaian peserta sebesar 89,58%, serta tingkat kelulusan kompeten mencapai 62,79%.

Di sisi lain, terdapat beberapa UPTD BLK yang belum merealisasikan kegiatan pelatihan pada periode pelaporan, yaitu UPTD BLK Konawe Selatan, UPTD BLK Kolaka Utara, dan UPTD BLK Konawe Utara. Adapun Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau melaksanakan 2 paket pelatihan dengan 28 orang peserta, dengan tingkat kelulusan kompeten sebesar 89,29%.

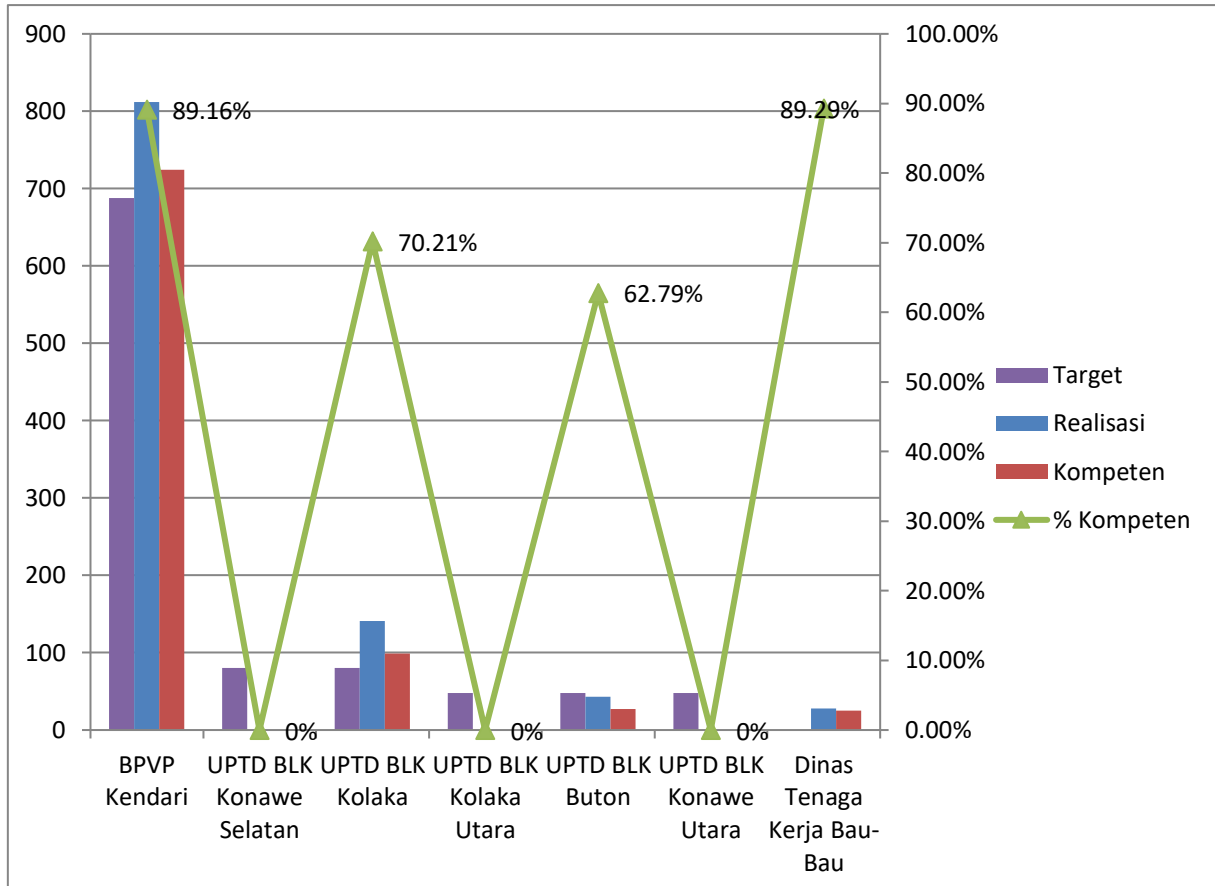
Secara kumulatif, dari total 1.024 peserta pelatihan yang mengikuti uji kompetensi, sebanyak 875 orang (85,50%) dinyatakan kompeten dan 149 orang (14,50%) belum kompeten. Dengan demikian, berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja IKK-1 telah mencapai dan melampaui target, dengan persentase capaian kinerja sebesar 87,20%, yang menunjukkan efektivitas pelaksanaan program pelatihan vokasi dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja.

Namun demikian, pelaksanaan uji kompetensi pada UPTD BLK Kolaka Utara dan UPTD BLK Konawe Selatan tidak dapat dilaksanakan karena adanya revisi anggaran, khususnya pada komponen perjalanan dinas yang dihilangkan. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakjelasan pemanfaatan anggaran dimaksud, sehingga berdampak pada tidak terlaksananya penugasan asesor ke Tempat Uji Kompetensi (TUK) di kedua UPTD tersebut.

Selanjutnya, pelaksanaan uji kompetensi di UPTD BLK Konawe Utara juga tidak dapat direalisasikan karena pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) baru dilaksanakan pada bulan Oktober 2025, yang menyebabkan waktu pelaksanaan uji kompetensi menjadi sangat terbatas. Selain itu, anggaran perjalanan dinas asesor ke TUK UPTD BLK Konawe Utara sudah tidak tersedia, sehingga secara teknis dan administratif pelaksanaan uji kompetensi tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, LSP BPVP Kendari mengambil kebijakan untuk memaksimalkan pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi di TUK UPTD BPVP Kendari sebagai langkah mitigasi, guna memastikan target capaian kinerja tetap dapat dioptimalkan meskipun menghadapi keterbatasan anggaran dan waktu pelaksanaan.

Gambar 3. 1
Grafik Realisasi Pengukuran Indikator Kinerja (IKK) – 1 Tahun 2025.



Sejalan dengan capaian kinerja dan berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana diuraikan di atas, diperlukan pemahaman yang sama terhadap makna dan standar kompetensi yang menjadi tolok ukur keberhasilan program pelatihan. Dalam sasaran kinerja tersebut, yang dimaksud dengan kompetensi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, BPVP Kendari perlu terus meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi lulusan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK), khususnya dalam pemenuhan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang memenuhi persyaratan, agar tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan uji kompetensi. Selain itu, dalam pelaksanaan PBK, instruktur yang melaksanakan

proses pembelajaran diharapkan lebih memperhatikan kesesuaian materi dan metode pembelajaran dengan skema uji kompetensi, sehingga proses pelatihan dapat lebih terarah dan berkontribusi optimal terhadap pencapaian kompetensi peserta.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 s/d 2025

Tabel 3. 4.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja IKK-1
Tahun 2023 s/d 2025

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian Kinerja (%)	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian Kinerja (%)	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian Kinerja (%)
1.	Jumlah Tenaga Kerja yang disertifikasi	1.908	1.912	100,21	2.180	1.901	87,20	992	1.024	103,23

IKK-1 : Jumlah Tenaga Kerja yang disertifikasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, kompetensi kerja didefinisikan sebagai kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) merupakan pelatihan kerja yang menitikberatkan pada pencapaian kompetensi kerja peserta sebagai prasyarat utama dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

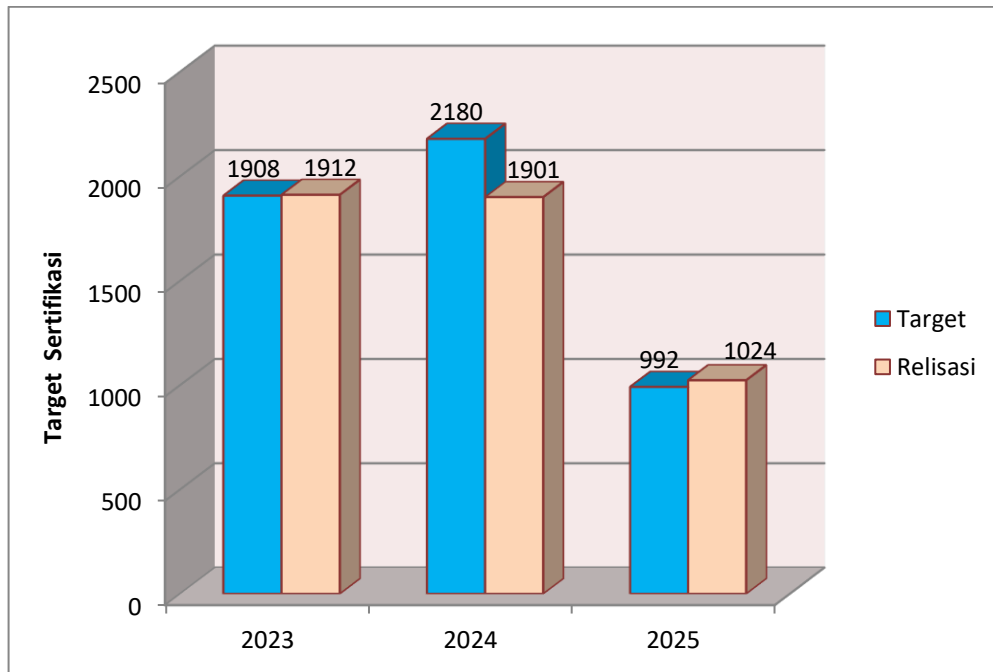
Berdasarkan tabel perbandingan realisasi capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK-1) selama periode Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025, dapat diketahui bahwa capaian kinerja BPVP Kendari mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Pada Tahun 2023, ditetapkan target sertifikasi sebanyak 1.908 orang, dengan realisasi sebanyak 1.912 orang, sehingga capaian kinerja mencapai 100,21%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan uji kompetensi pada tahun tersebut telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Selanjutnya, pada Tahun 2024, target sertifikasi kompetensi meningkat menjadi 2.180 orang, namun realisasi yang dicapai sebanyak 1.901 orang, sehingga capaian kinerja berada pada angka 87,20%. Tidak tercapainya target secara optimal pada tahun tersebut disebabkan oleh adanya blokir anggaran, yang berdampak pada keterbatasan pelaksanaan kegiatan uji kompetensi. Meskipun demikian, kinerja LSP P2 BPVP Kendari tetap menunjukkan peningkatan yang signifikan, khususnya dalam pengelolaan manajemen asesor, penjadwalan uji kompetensi, serta persiapan Tempat Uji Kompetensi (TUK). Hal tersebut berdampak pada meningkatnya efektivitas dan kualitas pelaksanaan uji kompetensi.

Pada Tahun 2025, ditetapkan target sertifikasi sebanyak 992 orang, dengan realisasi mencapai 1.024 orang, sehingga capaian kinerja mencapai 103,23%. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya, yang tidak terlepas dari semakin baiknya penataan dan penyelenggaraan program pelatihan pada seluruh instansi binaan BPVP Kendari, serta optimalisasi pelaksanaan sertifikasi lulusan pelatihan.

Secara keseluruhan, capaian IKK-1 selama periode Tahun 2023 s.d. 2025 menunjukkan bahwa BPVP Kendari terus berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja. Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran dan kendala teknis pada tahun tertentu, upaya perbaikan berkelanjutan dalam manajemen pelaksanaan uji kompetensi dan koordinasi lintas unit telah memberikan dampak positif terhadap pencapaian kinerja secara kumulatif.

Gambar 3. 2.
Grafik Perbandingan Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK-1)
Tahun 2023–2025



c. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Hambatan yang di hadapi :

i. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Kompetensi Tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana di UPTP

Pelaksanaan sertifikasi di UPTP masih menghadapi kendala keterbatasan peralatan di Tempat Uji Kompetensi (TUK), khususnya untuk pelaksanaan uji kompetensi selama dua hari. Beberapa TUK seperti Processing belum memiliki peralatan oven yang memadai. Selain itu, pada TUK Bisnis Manajemen (Bisman), Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Listrik, dan Elektronika (pelatihan PBL), masih terdapat kekurangan peralatan pendukung jaringan/wifi.

2. Keterbatasan Peralatan Sertifikasi di UPTD

Pelaksanaan sertifikasi di UPTD juga terkendala oleh belum memadainya peralatan uji kompetensi. Pada skema welding, peralatan blender tidak tersedia di hampir seluruh UPTD. Sementara itu, pada skema servis sepeda motor injeksi, peralatan (*tools*) injeksi dan motor radiator belum tersedia di TUK.

3. Koordinasi Anggaran dan Perjalanan Dinas

Tim pengelola sertifikasi perlu meningkatkan koordinasi dengan tim penyusunan anggaran untuk memetakan kebutuhan biaya perjalanan dinas. Hal ini penting agar mobilitas ke daerah atau lokasi pelaksanaan Uji Kompetensi (UJK) dapat berjalan sesuai ketentuan dan tidak menjadi hambatan bagi petugas yang ditugaskan.

4. Kendala Program Pelatihan di UPTD dan Administrasi Sertifikasi

Program pelatihan yang dilaksanakan di UPTD masih terkendala keterbatasan peralatan sehingga belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan Sertifikasi Lulusan Pelatihan. Selain itu, aspek administrasi berupa surat permohonan pelaksanaan sertifikasi dari UPTD kepada Tim LSP P2 BPVP Kendari perlu lebih diperhatikan agar proses sertifikasi dapat berjalan tepat waktu dan sesuai prosedur.

ii. Solusi yang dilakukan atas hambatan yang dihadapi :

Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tahun 2025, telah dilakukan beberapa upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana TUK di UPTP

Melakukan penambahan dan pemenuhan peralatan di masing-masing Tempat Uji Kompetensi (TUK) pada UPTP agar sesuai dengan standar kebutuhan skema sertifikasi, sehingga pelaksanaan uji kompetensi dapat berjalan optimal dan sesuai ketentuan.

2. Koordinasi dengan UPTD Terkait Penambahan Peralatan

Melakukan koordinasi dengan Kepala BLK atau penanggung jawab di masing-masing UPTD binaan guna mendorong penambahan dan pemenuhan peralatan uji kompetensi sesuai skema yang dilaksanakan, sehingga kesiapan TUK di UPTD dapat ditingkatkan.

3. Penguatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Perjalanan Dinas

Berkoordinasi dengan tim perencanaan untuk memastikan ketersediaan dan kecukupan anggaran perjalanan dinas asesor, agar pelaksanaan Uji Kompetensi (UJK) dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Peningkatan Kesiapan Sarana Prasarana dan Administrasi UPTD

Melakukan pembinaan dan koordinasi secara berkelanjutan dengan UPTD binaan agar lebih memperhatikan kesiapan sarana dan prasarana pelatihan, sehingga pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi lulusan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, mendorong UPTD untuk menyampaikan surat permohonan Sertifikasi Lulusan Pelatihan kepada Tim LSP P2 BPVP Kendari secara tepat waktu dan sesuai prosedur yang ditetapkan.

iii. Upaya yang akan dilakukan pada tahun 2026

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tahun 2026, BPVP Kendari akan melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan Penanggung Jawab TUK di UPTP

Melakukan koordinasi secara intensif dengan penanggung jawab masing-masing Tempat Uji Kompetensi (TUK) di UPTP guna memastikan kesiapan sarana dan prasarana, serta kesesuaian peralatan dengan skema sertifikasi yang akan dilaksanakan.

2. Koordinasi dengan Penanggung Jawab di UPTD

Melaksanakan koordinasi dengan penanggung jawab di UPTD binaan untuk memperoleh gambaran kesiapan pelaksanaan sertifikasi, termasuk ketersediaan peralatan uji kompetensi dan dukungan sarana pelatihan yang diperlukan.

3. Identifikasi Awal Program Pelatihan dan Skema Uji Kompetensi

Melakukan identifikasi program pelatihan dan skema uji kompetensi sejak awal tahun anggaran, sehingga perencanaan pelaksanaan Uji Kompetensi (UJK) dapat disusun secara lebih matang dan pelaksanaannya dapat berjalan efektif, efisien, dan sesuai ketentuan.

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja yang telah diraih hingga akhir Tahun 2025, BPVP Kendari berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas dan kemampuan kelembagaan dalam menciptakan alumni pelatihan yang kompeten dan berdaya saing. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kualitas penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK), sehingga lulusan memiliki keahlian yang sesuai dengan standar kompetensi dan kebutuhan dunia usaha serta dunia industri.

A.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA IKK-2

a. Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3. 5.

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan 2 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Awal	Target Revisi	Realisasi	Capaian %
Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Yang Berkualitas	1.861 Orang	1.840 Orang	1.872 Orang	101,74%

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan (IKK-2) Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan yang Berkualitas, BPVP Kendari menetapkan target awal sebanyak 1.861 orang, yang kemudian direvisi menjadi 1.840 orang. Adapun realisasi capaian hingga akhir tahun 2025 mencapai 1.872 orang, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 101,74% dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan vokasi dan pemagangan di BPVP Kendari telah berjalan dengan baik dan melampaui target yang direncanakan. Hasil capaian kinerja IKK-2 disajikan dalam Tabel 3.6 di bawah ini :

Tabel 3. 6.

Data Pelatihan PBK BPVP Kendari

	UPTP/UPTD	Target Awal (Orang)	Target Revisi (Orang)	Realisasi (Orang)	Realisasi (%)
1.	PBK UPTP BPVP Kendari	944	1.341	1.312	97,84%
3.	Pelatihan PFLK	5	3	0	0%
4.	PBK Provinsi Sulawesi Tenggara	816	496	560	112,90%
5.	BLK UPTD Lainya	240	96	112	116,67%
6.	BLK UPTD Kolaka	320	224	240	107,14%
7.	BLK UPTD Kolaka Utara	128	64	80	125%
8.	BLK UPTD Buton	80	64	80	125%
9.	BLK UPTD Konawe Utara	48	48	48	100%
10.	Bantuan Program PBK	96	0	0	0

Jumlah	1.861	1.840	1.872	101,74%
--------	-------	-------	-------	---------

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan (IKK-2) “*Jumlah tenaga kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi*” pada tahun berjalan mencapai 101,74%, yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan.

Meskipun demikian, pada beberapa kegiatan masih terdapat realisasi yang belum optimal, bahkan tidak terealisasi sama sekali, seperti pada kegiatan Pelatihan PFLK dan Bantuan Program PBK. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya blokir anggaran melalui mekanisme Automatic Adjustment, serta kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya, sehingga sebagian target kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara penuh.

Upaya menekan angka pengangguran tidak hanya menjadi tanggung jawab BPVP Kendari dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, tetapi juga pemerintah kabupaten/kota serta seluruh pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat dengan pihak swasta, khususnya dunia usaha dan dunia industri, agar penyelenggaraan pelatihan vokasi dan penyerapan tenaga kerja dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 s.d 2025

Untuk melihat perbandingan realisasi kinerja jumlah tenaga kerja yang memperoleh Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025, dapat dilihat pada Tabel 3.7 di bawah ini.

Tabel 3. 7.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 s.d 2025

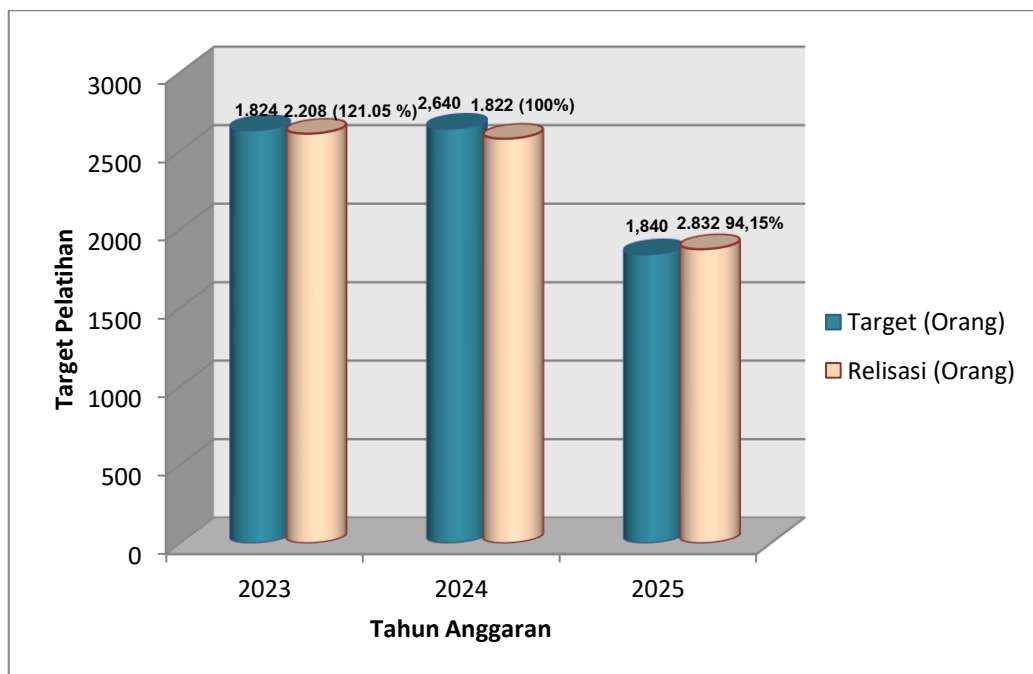
No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian Kinerja (%)	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian Kinerja (%)	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian Kinerja (%)
1.	Jumlah tenaga kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	2.630	2.608	99,16	2.640	2.576	97,58%	1.341	1.872	101,74%

Berdasarkan data pada tabel di atas, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK-2) “Jumlah tenaga kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi” pada periode tahun 2023 hingga 2025 menunjukkan adanya fluktuasi capaian, baik peningkatan maupun penurunan.

Perubahan capaian ini dipengaruhi oleh tingginya minat masyarakat untuk meningkatkan kompetensi kerja seiring dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja di wilayah Sulawesi Tenggara. Selain itu, semakin banyak perusahaan yang menerapkan persyaratan kepemilikan Sertifikat Keahlian/Kompetensi dalam proses rekrutmen turut memengaruhi jumlah peserta pelatihan.

Apabila ditinjau dari realisasi kinerja tahun 2023 hingga 2025, perbandingan capaian IKK-2 dapat divisualisasikan melalui grafik berikut:

Gambar 3. 3.
Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 s/d 2025



c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan.

- Pencapaian Tahun 2025 dilakukan Melalui Kegiatan :

Realisasi pelaksanaan kegiatan PBK BPVP Kendari Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3. 8.
Target dan Realisasi Pelaksanaan PBK UPTP Tahun 2025

Rincian Output	Target awal	Target revisi	Realisasi	Capaian %
Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Yang Berkualitas	816 Orang	496 Orang	560 Orang	112,90%

Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) pada Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan melalui beberapa skema pelatihan, meliputi Pelatihan Reguler Non Boarding, Project Based Learning (PBL) Smart Sektor, dan Tailor Made Training. Berdasarkan data target dan realisasi, seluruh program pelatihan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan terealisasi 100 persen.

Pada skema Pelatihan Reguler Non Boarding, BPVP Kendari menargetkan sebanyak 49 paket pelatihan dengan jumlah peserta 784 orang, yang tersebar pada berbagai kejuruan seperti Bisnis dan Manajemen, Fashion Technology, Pariwisata, Pertambangan, Refrigerasi, Tata Kecantikan, Teknik Bangunan, Teknik Elektronika, Teknik Las, Teknik Otomotif, Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Teknologi Pertanian. Seluruh target tersebut berhasil direalisasikan sesuai rencana, baik dari sisi jumlah paket maupun jumlah peserta.

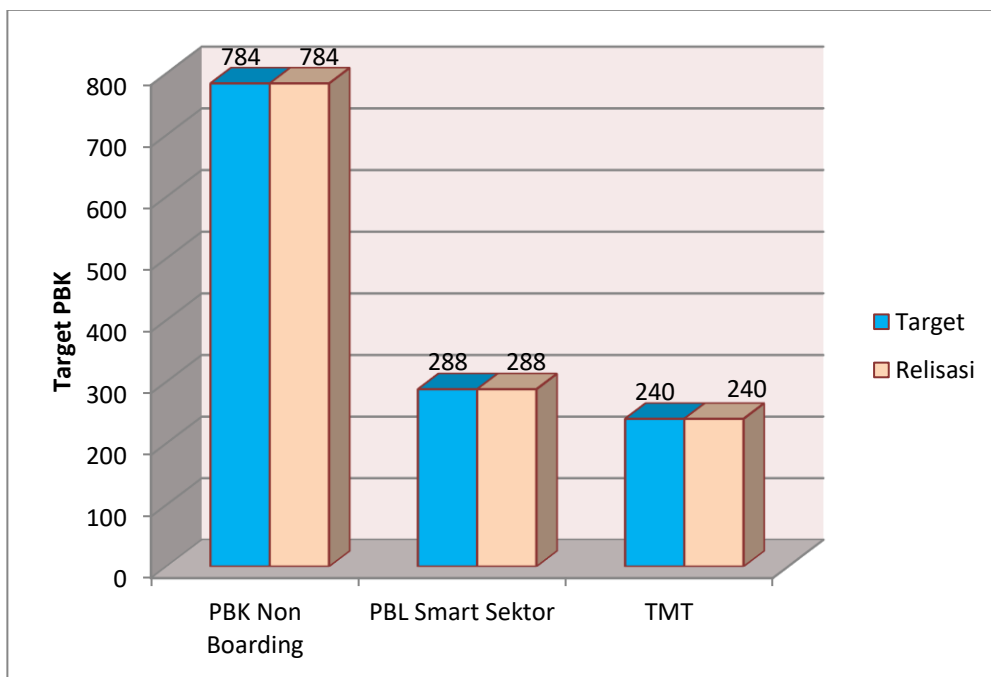
Selanjutnya, pada skema PBL Smart Sektor, pelatihan difokuskan pada penguatan kompetensi berbasis proyek dan kebutuhan sektor strategis. BPVP Kendari menargetkan 18 paket pelatihan dengan jumlah peserta sebanyak 288 orang, yang mencakup program seperti Automatic Irrigation System, Digital Office Administration Berbasis Google Workspace, Pembuatan Konten Visual untuk Sosial Media, Pengoperasian Tools Generative AI, serta Teknisi Sistem Integrasi Bangunan Cerdas. Seluruh target PBL Smart Sektor tersebut juga terealisasi sepenuhnya.

Sementara itu, melalui skema Tailor Made Training, BPVP Kendari melaksanakan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masyarakat dan dunia usaha. Pada skema ini ditargetkan sebanyak 15 paket pelatihan dengan 240 orang peserta, yang mencakup berbagai program pada kejuruan Fashion

Technology, Pariwisata, Tata Kecantikan, Teknik Las, TIK, dan Teknologi Pertanian. Seluruh paket dan jumlah peserta pada skema ini juga berhasil direalisasikan 100 persen.

Secara keseluruhan, pada Tahun Anggaran 2025 BPVP Kendari menargetkan dan berhasil merealisasikan sebanyak 82 paket pelatihan dengan total 1.312 orang peserta. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi telah berjalan optimal, tepat sasaran, dan sesuai dengan perencanaan, serta mendukung peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja di wilayah Sulawesi Tenggara.

Gambar 3. 4.
Grafik Realisasi PBK UPTP BPVP Kendari



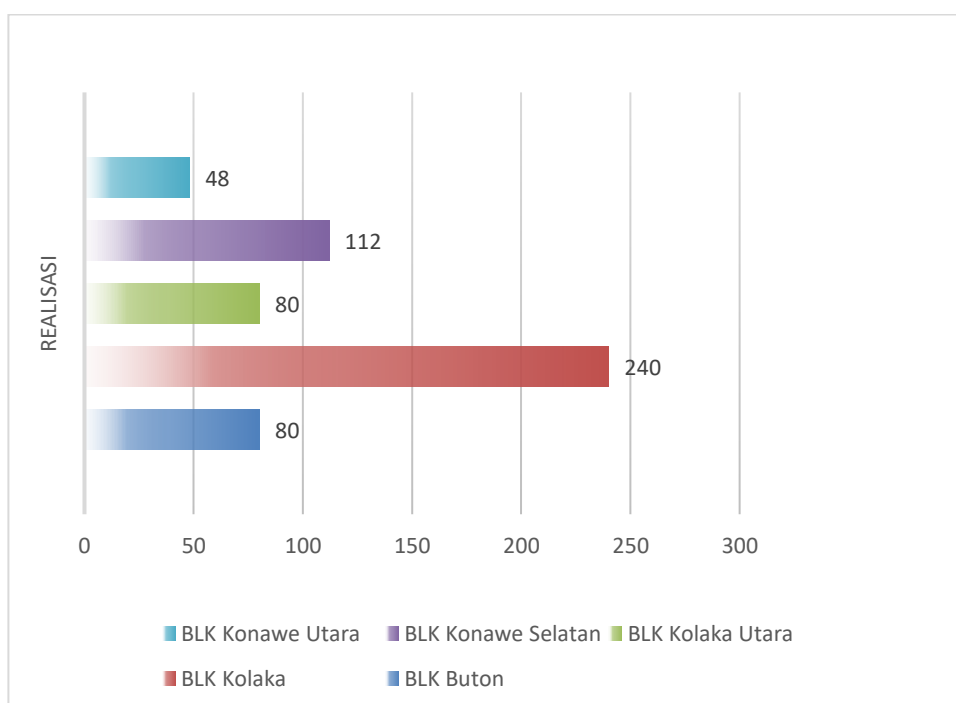
Tabel 3. 9.
Target dan Realisasi Pelaksanaan PBK di UPTPD Tahun 2025

Rincian Output	Target awal	Target revisi	Realisasi	Capaian %
Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Yang Berkualitas	944 Orang	1.341 Orang	1.312 Orang	97,84%

Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi pada UPTD binaan BPVP Kendari dilaksanakan melalui beberapa Balai Latihan Kerja (BLK), yaitu BLK Kolaka Utara, BLK Buton, BLK Kolaka, BLK Konawe Selatan, dan BLK Konawe Utara. Program pelatihan mencakup berbagai kejuruan strategis, antara lain Teknik Las, Teknik Otomotif, Teknik Bangunan, TIK, Bisnis dan Manajemen, Fashion Technology, Tata Kecantikan, Refrigerasi, Processing, serta Teknologi Pertanian. Secara keseluruhan, target pelatihan pada UPTD binaan ditetapkan sebanyak 35 paket pelatihan dengan jumlah peserta 560 orang, dan seluruhnya telah terealisasi 35 paket dengan 560 orang peserta, sehingga capaian pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelatihan pada UPTD binaan BPVP Kendari telah terlaksana sesuai dengan perencanaan, baik dari sisi jumlah paket maupun jumlah peserta, dalam rangka mendukung peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja di wilayah Sulawesi Tenggara.

Gambar 3. 5.

Grafik Realisasi PBK UPTD Binaan BPVP Kendari Tahun 2025



Tabel 3. 10.

Target dan Realisasi Pelaksanaan PBK PFLK Tahun 2025

Rincian Output	Target awal	Target revisi	Realisasi	Capaian %
Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Yang Berkualitas	5 Orang	3 Orang	0 Orang	0,00%

Pada tahun 2025, BPVP Kendari menetapkan target pelaksanaan Pelatihan PFLK sebanyak 1 paket dengan sasaran 3 orang peserta. Namun demikian, sampai dengan akhir tahun anggaran, pelaksanaan Pelatihan PFLK belum terealisasi, sehingga realisasi kegiatan tercatat 0 paket dengan 0 orang peserta. Dengan demikian, capaian pelaksanaan Pelatihan PFLK BPVP Kendari Tahun 2025 adalah 0% dari target yang telah ditetapkan

Meskipun pelaksanaan Pelatihan PFLK tidak terealisasi dan pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) di UPTP BPVP Kendari belum mencapai 100 persen, di mana target PBK UPTP BPVP Kendari sebesar 1.341 orang dengan realisasi sebanyak 1.312 orang atau sebesar 97,84 persen, namun secara keseluruhan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK-2) Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan yang Berkualitas tetap mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target revisi sebesar 1.840 orang, realisasi hingga akhir Tahun 2025 mencapai 1.872 orang, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat sebesar 101,74 persen.

Capaian tersebut didukung oleh adanya optimalisasi pelaksanaan pelatihan di UPTD binaan BPVP Kendari, khususnya pada PBK Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana target revisi sebanyak 496 orang berhasil direalisasikan menjadi 560 orang atau mencapai 112,90 persen. Peningkatan realisasi pada UPTD binaan ini mampu menutupi kekurangan realisasi pada pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi di unit lainnya, sehingga secara agregat capaian indikator kinerja dapat terpenuhi bahkan melampaui target yang direncanakan.

b. Hambatan yang dihadapi :

Dalam proses pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa hambatan atau kendala yang BPVP Kendari alami dalam pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi, diantaranya :

1. Masih kurangnya pemahaman dan informasi yang di dapatkan oleh calon peserta tentang BPVP Kendari terutama yang berada di daerah Pedesaan di Kabupaten;
2. Keterbatasan jumlah tenaga pelatih (instruktur). Kondisi ini menyebabkan BPVP Kendari masih harus memanfaatkan instruktur dari luar satuan kerja, khususnya untuk mengakomodasi pelaksanaan pelatihan di luar daerah (*tailor made training*);
3. Kendala jaringan pada proses pendaftaran peserta melalui Aplikasi SIAPkerja. Di beberapa wilayah, keterbatasan kualitas jaringan internet mengakibatkan proses pendaftaran peserta belum dapat berjalan secara optimal;
4. Keterbatasan sarana dan prasarana pelatihan. Masih terdapat kekurangan peralatan pendukung untuk pelaksanaan PBK, terutama pada kegiatan pelatihan berbasis penempatan (*Tailor Made Training*) di lokasi mitra atau daerah binaan;
5. Masih terbatasnya informasi dan kegiatan sosialisasi terkait pelaksanaan Pelatihan PFLK (Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja) menjadi salah satu kendala, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut belum dapat terealisasi pada tahun pelaporan.
6. Industri pertambangan yang membutuhkan Operator ataupun Teknisi alat berat yang kompeten meminta agar BPVP Kendari dapat menyediakan Tenaga Kerja yang dimaksud;
7. Persoalan ketenagakerjaan dan kemiskinan merupakan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga saja, tetapi perlu keterlibatan semua pihak, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha dan industri, maupun lembaga-lembaga pelatihan;

c. Solusi yang dilakukan atas hambatan yang dihadapi :

1. Melaksanakan promosi dan koordinasi secara berkelanjutan di daerah, serta mengoptimalkan pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebarluasan informasi terkait program dan jenis pelatihan yang diselenggarakan oleh BPVP Kendari.
2. Melakukan peningkatan kapasitas dan ketersediaan tenaga pelatih (instruktur) melalui pengembangan kompetensi, sertifikasi, serta pemanfaatan instruktur dari dunia usaha dan dunia industri sesuai kebutuhan kejuruan pelatihan.
3. Meningkatkan kolaborasi dan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menciptakan tenaga kerja yang andal, berdaya saing, dan kompeten, sekaligus merumuskan solusi bersama atas permasalahan ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Membangun dan memperkuat koordinasi penyelenggaraan pelatihan bersama Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri (FKLPI) guna mendukung penyelarasan program pelatihan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

d. Upaya yang akan dilakukan pada tahun 2026:

Upaya yang dilakukan oleh BPVP Kendari dalam hal ini mengatasi hambatan yang terjadi sehingga jumlah calon tenaga kerja kompeten yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi akan memenuhi target, yaitu :

1. **Penguatan sosialisasi dan promosi program pelatihan**
BPVP Kendari akan meningkatkan intensitas dan cakupan sosialisasi program pelatihan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, desa, dan kecamatan, serta memanfaatkan media digital dan kanal informasi resmi agar akses informasi pelatihan dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah pedesaan dan daerah terpencil.
2. **Peningkatan kapasitas dan ketersediaan tenaga pelatih (instruktur)**
BPVP Kendari akan mengusulkan penambahan instruktur sesuai kebutuhan kejuruan prioritas serta meningkatkan kompetensi instruktur

melalui pelatihan, sertifikasi, dan *upskilling* berbasis kebutuhan industri, termasuk pemanfaatan instruktur dari dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

3. **Optimalisasi mekanisme pendaftaran peserta pelatihan**
BPVP Kendari akan menyediakan layanan pendampingan pendaftaran secara luring (offline) dan pendaftaran kolektif di wilayah dengan keterbatasan jaringan internet, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan UPTD binaan untuk memastikan proses pendaftaran melalui Aplikasi SIAPkerja berjalan lebih efektif.
4. **Penguatan sarana dan prasarana pelatihan berbasis kebutuhan**
BPVP Kendari akan melakukan pemetaan dan pemenuhan kebutuhan peralatan pelatihan secara bertahap, serta mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas pelatihan milik mitra industri dalam pelaksanaan pelatihan berbasis penempatan (*tailor made training*).
5. **Optimalisasi pelaksanaan Pelatihan PFLK**
BPVP Kendari akan meningkatkan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan Pelatihan PFLK kepada pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dan mitra industri, serta mendorong pemanfaatan fasilitas latihan kerja yang tersedia agar pelaksanaan PFLK dapat terealisasi secara optimal.
6. **Pengembangan pelatihan berbasis kebutuhan industri strategis**
BPVP Kendari akan mengembangkan dan melaksanakan pelatihan berbasis kebutuhan industri strategis, khususnya sektor pertambangan, dengan menyesuaikan kurikulum pelatihan, skema sertifikasi, dan pola penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
7. **Penguatan sinergi dan kolaborasi lintas sektor**
BPVP Kendari akan memperkuat kerja sama lintas sektor dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha dan dunia industri, serta lembaga pelatihan kerja lainnya dalam rangka meningkatkan efektivitas program pelatihan, memperluas penempatan tenaga kerja, dan mendukung pengurangan pengangguran serta kemiskinan secara berkelanjutan.

Dengan capaian kinerja Tahun 2025 tersebut, hasil yang diperoleh akan digunakan sebagai bahan evaluasi serta menjadi acuan dalam perbaikan dan peningkatan pelaksanaan kegiatan sejenis pada tahun berikutnya, sehingga diharapkan kinerja BPVP Kendari pada Tahun 2026 dapat semakin optimal dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas serta daya saing tenaga kerja.

A.3. ANALISIS CAPAIAN KINERJA IKK- 3

Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Binalovotas

a. Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3. 11.

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan 3 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL	TARGET REVISI	REALISASI	CAPAIAN %
Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Binalavotas	50 Orang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%

IKK-3 : Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Binalavotas

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja, BPVP Kendari melaksanakan kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Binalavotas sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk memastikan tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun pelaporan.

Indikator kinerja Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Binalavotas pada tahun pelaporan ditetapkan dengan target awal sebanyak 50 orang melalui 1 kegiatan. Dalam pelaksanaannya, target tersebut tidak mengalami revisi dan tetap ditetapkan 1

kegiatan. Realisasi kinerja menunjukkan bahwa kegiatan dimaksud telah terlaksana seluruhnya, sehingga capaian kinerja mencapai 100,00 persen.

A.4. ANALISIS CAPAIAN KINERJA IKK- 4

Terlaksananya Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

a. Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3. 12.

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan 4 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL	TARGET REVISI	REALISASI	CAPAIAN %
Terlaksananya Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	6 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	100%

Indikator kinerja Terlaksananya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada awalnya ditetapkan dengan target sebesar 6 layanan. Target tersebut terdiri atas layanan dukungan manajemen internal yang meliputi Layanan Data dan Informasi (2 layanan), Layanan Perkantoran (1 layanan), Layanan Pemantauan dan Evaluasi (1 layanan), Layanan Manajemen Keuangan (1 layanan), serta Layanan Reformasi Kinerja (1 layanan).

Dalam pelaksanaannya, dilakukan penyesuaian target kinerja sehingga target direvisi menjadi 5 layanan, dengan komposisi Layanan Data dan Informasi (1 layanan), Layanan Perkantoran (1 layanan), Layanan Pemantauan dan Evaluasi (1 layanan), Layanan Manajemen Keuangan (1 layanan), dan Layanan Reformasi Kinerja (1 layanan). Revisi target ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta efektivitas pelaksanaan dukungan manajemen pada tahun berjalan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kinerja, realisasi indikator Terlaksananya Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

mencapai 5 layanan, sesuai dengan target revisi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja indikator ini mencapai 100 persen, yang menunjukkan bahwa seluruh layanan dukungan manajemen internal telah dilaksanakan secara optimal dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Dalam pelaksanaannya, dukungan manajemen mencakup berbagai kegiatan administrasi yang menunjang proses dasar penyelenggaraan perkantoran, antara lain tersusunnya rencana program dan rencana anggaran, terlaksananya pemantauan dan evaluasi kinerja, tersedianya informasi Indeks PMPRB, persentase tindak lanjut atas temuan pengawasan, nilai hasil evaluasi SAKIP, serta tingkat maturitas pelayanan publik instansi pemerintah. Selain itu, dukungan manajemen juga diwujudkan melalui terlaksananya layanan pengelolaan kepegawaian dan tata kelola organisasi internal, pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, serta operasional dan pemeliharaan kantor secara berkelanjutan guna mendukung pencapaian kinerja organisasi secara efektif dan akuntabel.

B. REALISASI ANGGARAN

B.1. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Untuk mendukung seluruh kegiatan operasional Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari pada Tahun Anggaran 2025, BPVP Kendari pada awalnya memperoleh alokasi anggaran sebesar **Rp25.515.105.000,00** (dua puluh lima miliar lima ratus lima belas juta seratus lima ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam pagu awal tertanggal 2 Desember 2024. Dalam perkembangannya, anggaran tersebut mengalami revisi sehingga pagu anggaran BPVP Kendari Tahun Anggaran 2025 berubah menjadi **Rp21.111.544.000,00** (dua puluh satu miliar seratus sebelas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang merupakan pagu anggaran terakhir.

Tabel 3. 13.

Tabel Revisi yang Terjadi Pada Tahun 2025

Revisi Anggaran	Jenis Revisi	Pagu Awal	Pagu Revisi	Keterangan
DIPA Awal	-	25.515.105.000	25.515.105.000	DIPA awal Pada tanggal 2 Desember 2024
Revisi Ke-1	Revisi DIPA	25.515.105.000	25.515.105.000	Revisi penghematan anggaran melalui blokir anggaran pada tanggal 21 Februari 2025
Revisi Ke-2	Revisi DIPA	25.515.105.000	25.515.105.000	Revisi halaman III DIPA pada tanggal 24 April 2025
Revisi Ke-3	Revisi DIPA	25.515.105.000	25.515.105.000	Revisi optimalisasi anggaran UPTD pada tanggal 24 April 2025
Revisi Ke-4	Revisi DIPA	25.515.105.000	25.515.105.000	Revisi buka blokir pada tanggal 16 Juni 2025
Revisi Ke-5	Revisi DIPA	25.515.105.000	25.515.105.000	Revisi halaman III DIPA (Kanwil) pada tanggal 16 Juli 2025
Revisi Ke-6	Revisi DIPA	25.515.105.000	25.515.105.000	Revisi penambahan gaji pada tanggal 21 Agustus 2025
Revisi Ke-7	Revisi DIPA	25.515.105.000	25.630.105.000	Revisi gaji dan operasional (Kanwil) pada tanggal 21 Agustus 2025
Revisi Ke-8	Revisi DIPA	25.630.105.000	25.630.105.000	Revisi pemutakhiran data POK pada tanggal 14 Oktober 2025
Revisi Ke-9	Revisi DIPA	25.630.105.000	21.111.544.000	Revisi buka blokir dan penambahan anggaran gaji pada tanggal 13 November 2025
Revisi Ke-10	Revisi DIPA	21.111.544.000	21.111.544.000	Revisi pemutakhiran data POK pada tanggal 9 Desember 2025
Revisi Ke-11	Revisi DIPA	21.111.544.000	21.111.544.000	Revisi pemutakhiran data POK pada tanggal 12 Desember 2025

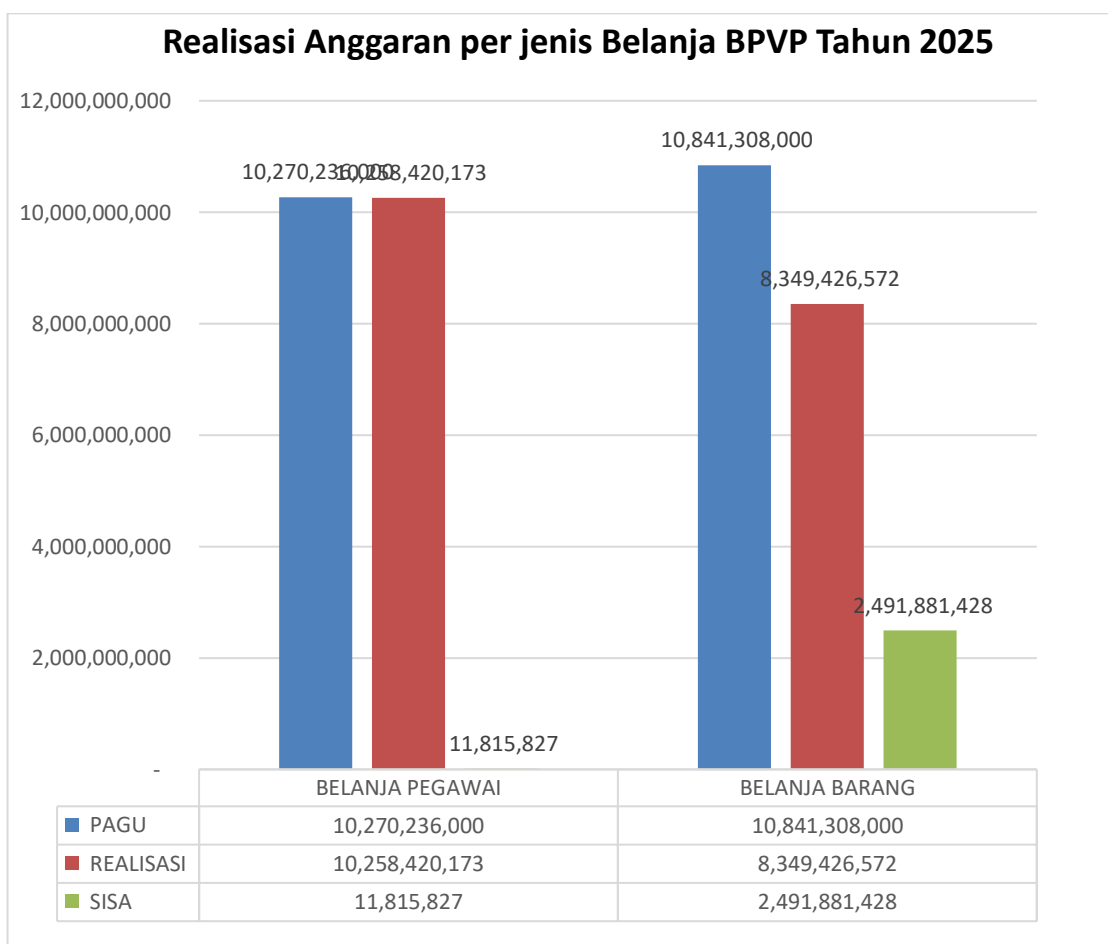
Pelaksanaan revisi mendukung perolehan nilai IKPA di Aplikasi Omspan, dan nilai Efisiensi di Aplikasi SMART DJA (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu). IKPA adalah Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, yaitu

indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga dan satuan kerja, yang mencakup aspek perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta hasil pelaksanaan anggaran.

Pelaksanaan anggaran sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM SPAN, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari memperoleh nilai IKPA sebesar 90,46 persen. Nilai tersebut merupakan hasil akumulasi dari beberapa aspek penilaian, meliputi kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Gambar 3. 6.

Grafik Nilai Kinerja Anggaran Perjenis Belanja



Capaian Relaisasi Anggaran Pada Aplikasi Om Span Bulan Desember 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, realisasi keuangan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari pada Tahun 2025 mencapai 88,14 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp21.111.544.000, dengan sisa anggaran sebesar Rp2.503.697.255

B.2. Tabel Dan Grafik Realisasi Anggaran Tahun 2016 s.d 2025

Adapun perbandingan rekapitulasi alokasi dan realisasi keuangan BPVP Kendari dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2025 selengkapnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 14.

Rekapitulasi Realisasi Keuangan BPVP Kendari
Tahun 2016 – 2025

No	Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Fisik (%)
			(Rp)	%	
1.	2016	16.889.895.000	15.520.304.576	91,89	100
2.	2017	17.895.275.000	17.047.095.073	95,26	100
3.	2018	32.070.187.000	27.989.934.149	87,18	100
4.	2019	58.889.968.000	54.708.372.275	92,90	99,1
5.	2020	36.654.172.000	35.503.662.770	96,86	100
6.	2021	32.687.016.000	32.080.139.196	98,14	100
7.	2022	36.936.628.000	34.925.747.638	94,56	95,95
8.	2023	33.952.746.000	33.317.709.118	98,13	100,66
9.	2024	33.062.682.000	32.825.904.406	99,28	107,20
10.	2025	21.111.544.000	18.607.846.745	88,14	101,24

Berdasarkan tabel rekapitulasi realisasi keuangan BPVP Kendari tahun 2016 sampai dengan tahun 2025, terlihat bahwa realisasi keuangan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Persentase realisasi keuangan secara umum berada pada kisaran yang cukup baik, meskipun pada beberapa tahun terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

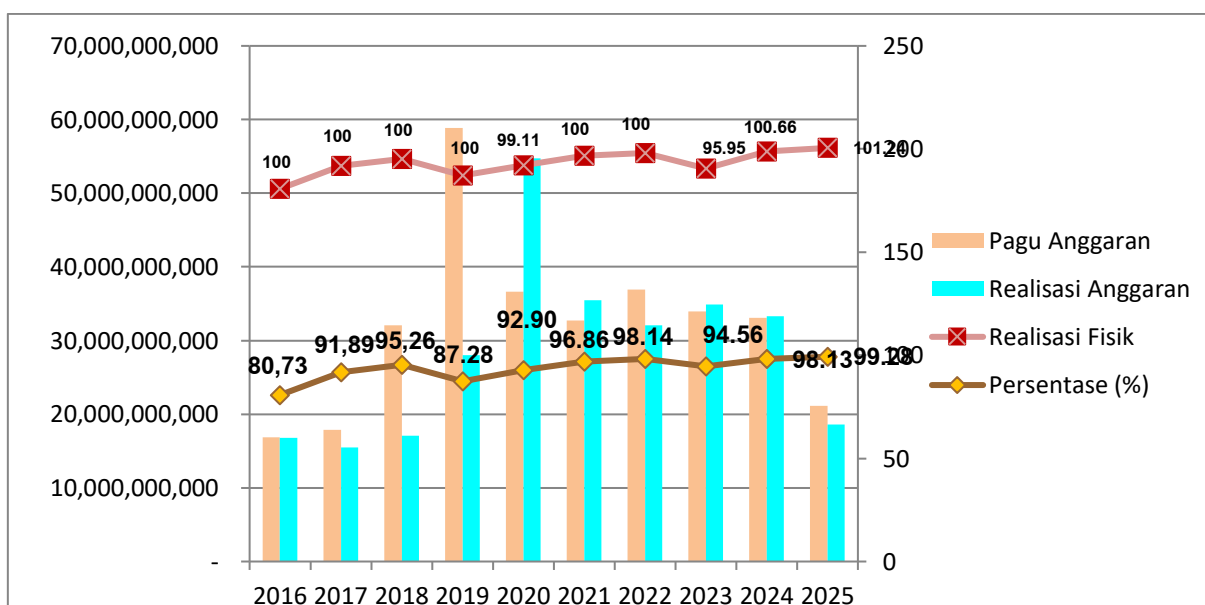
Sementara itu, realisasi fisik pada tahun 2016 hingga tahun 2018 mencapai 100 persen. Pada tahun 2019, realisasi fisik sedikit menurun menjadi 99,11 persen. Selanjutnya, pada tahun 2020 dan 2021 realisasi fisik kembali mencapai 100 persen.

Pada tahun 2022, realisasi fisik mengalami penurunan menjadi 95,95 persen. Namun demikian, pada tahun 2023 realisasi fisik kembali meningkat menjadi 100,66 persen dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan dengan capaian sebesar 107,20 persen.

Secara keseluruhan, kinerja anggaran BPVP Kendari menunjukkan hasil yang baik, dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 88,14% dan realisasi capaian output mencapai 101,24%. Hal ini mencerminkan keberhasilan yang cukup solid dalam pengelolaan anggaran, sekaligus menjadi peluang untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan agar capaian kinerja ke depan dapat lebih optimal.

Adapun Grafik perbandingannya dapat dilihat pada grafik di bawah :

Gambar 3. 7.
Grafik Rekapitulasi dan Realisasi Keuangan BPVP Kendari Tahun 2016 – 2025



Berdasarkan grafik di atas, perbandingan realisasi keuangan BPVP Kendari pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan adanya fluktuasi berupa peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2016, realisasi keuangan mencapai 91,89 persen, kemudian meningkat pada Tahun 2017 menjadi 95,26 persen. Pada Tahun 2018 realisasi mengalami penurunan menjadi 87,18 persen, namun kembali meningkat pada Tahun 2019 sebesar 92,90 persen.

Selanjutnya, pada Tahun 2020 realisasi keuangan mencapai 96,86 persen dan meningkat lagi pada Tahun 2021 menjadi 98,14 persen. Pada Tahun 2022 terjadi penurunan realisasi menjadi 94,56 persen, kemudian kembali meningkat

pada Tahun 2023 sebesar 98,13 persen. Pada Tahun 2024, realisasi keuangan mencapai nilai tertinggi sebesar 99,28 persen, sedangkan pada Tahun 2025 realisasi keuangan tercatat sebesar 88,14 persen.

B.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran BPVP Kendari pada Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang mendukung keberhasilan maupun yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, yang berdampak pada penyesuaian pagu serta perubahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, sehingga memengaruhi tingkat penyerapan anggaran pada beberapa program.
2. Adanya instruksi untuk menghentikan atau menunda sementara pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi, yang menyebabkan sebagian kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal awal dan berdampak pada tertundanya realisasi anggaran.
3. Penerapan self-blocking anggaran, yang mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
4. Efisiensi dalam penggunaan anggaran, yang dilaksanakan secara cukup baik sehingga pelaksanaan kegiatan tetap dapat berjalan efektif dan berkontribusi positif terhadap capaian realisasi anggaran BPVP Kendari pada tahun pelaporan.

B.4 Pencapaian Tahun 2025 dilakukan melalui kegiatan

Pencapaian tahun 2025 dilakukan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

B.4.1 Tabel Realisasi Per Jenis Kegiatan Anggaran Tahun 2025

Tabel 3. 15.

Realisasi Keuangan BPVP Kendari 2025

NO	Kegiatan	Anggaran Sebelum (Rp)	Anggaran Revisi	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Binalavotas	596.096.000	587.633.000	473.403.537	(80.56%)
2	Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas	12.873.054.000	6.533.288.000	5.716.622.057	(87.50%)
3	Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Binalavotas	225.730.000	15.398.000	15.396.810	(99.99%)
4	Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	11.820.255.000	13.975.225.000	12.402.424.341	(88.75%)
TOTAL		25,515,105,000	21.111.544.000	18.607.846.745	88,14%

Pencapaian kinerja anggaran BPVP Kendari pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik. Berdasarkan tabel di atas, BPVP Kendari memperoleh pagu anggaran awal sebesar Rp25.515.105.000, yang setelah dilakukan revisi menjadi Rp21.111.544.000. Dari pagu revisi tersebut, realisasi anggaran yang dicapai sebesar Rp18.607.846.745 atau 88,14%. Capaian ini merupakan hasil kerja sama seluruh pegawai BPVP Kendari dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Namun demikian, realisasi anggaran pada masing-masing kegiatan belum sepenuhnya merata. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa perubahan

kebijakan pada tahun berjalan yang berdampak pada penyesuaian pelaksanaan kegiatan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan koordinasi dan komunikasi yang efektif antar seksi pelaksana kegiatan, serta sinergi yang berkelanjutan antara BPVP Kendari dengan kantor daerah dan kantor pusat agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan lebih optimal dan merata.

Meskipun demikian, apabila dicermati berdasarkan pagu riil, yaitu pagu anggaran tanpa blokir sebesar Rp19.544.976.000, maka realisasi riil penyerapan anggaran BPVP Kendari mencapai 95,21%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pada kegiatan yang efektif dilaksanakan telah berjalan sangat optimal.

B.5. Hambatan yang dihadapi

Adapun pencapaian realisasi keuangan pada tahun 2025 tidak terlepas dari adanya beberapa hambatan yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan tahun 2025. Hambatan yang ditemui antara lain:

1. Adanya kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran, yang mempengaruhi alokasi dan penggunaan dana selama pelaksanaan kegiatan
2. Penundaan sementara pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) pada bulan Februari, sehingga mempengaruhi ritme realisasi keuangan di awal tahun.
3. Perubahan jadwal kegiatan akibat padatnya agenda BPVP Kendari, yang sering menimbulkan kendala dalam penyerapan anggaran sehingga realisasi di akhir tahun terkadang mengalami hambatan.

B.6. Solusi yang dilakukan atas hambatan yang dihadapi

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut antara lain:

1. Optimalisasi perencanaan dan pengelolaan anggaran
BPVP Kendari akan menyusun perencanaan anggaran secara lebih rinci dan fleksibel, sehingga dapat menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran tanpa mengganggu pelaksanaan kegiatan prioritas

2. Penjadwalan ulang kegiatan secara proaktif
Untuk mengantisipasi penundaan atau penghentian sementara kegiatan seperti PBK, BPVP Kendari akan membuat jadwal alternatif yang memungkinkan percepatan pelaksanaan kegiatan di bulan-bulan berikutnya, sehingga realisasi anggaran tetap optimal.
3. BPVP Kendari akan meningkatkan koordinasi internal antar unit dan dengan pihak terkait, agar perubahan jadwal kegiatan dapat diinformasikan dan dikelola dengan cepat, sehingga pengelolaan dana tetap tepat waktu dan sesuai peruntukan.
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi keuangan akan dilakukan secara rutin setiap bulan untuk mendeteksi potensi hambatan lebih awal, serta mengambil langkah korektif agar realisasi anggaran akhir tahun dapat tercapai sesuai target.

B.7. Upaya yang akan dilakukan pada tahun 2026

Agar proses pelaksanaan kegiatan pada tahun 2026 dapat terlaksana dengan baik maka perlu dilakukan langkah-langkah dan penyusunan rencana yang baik sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan dengan maksimal. Adapun rencana yang perlu dilakukan untuk tahun 2026 yaitu:

1. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran yang matang untuk seluruh kegiatan sepanjang tahun 2026.
2. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar seksi dan seluruh stakeholder BPVP Kendari;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di internal BPVP Kendari;
4. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi disetiap kegiatan yang dilakukan.



BAB IV PENUTUP



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPVP Kendari Tahun 2025 disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2025. Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja BPVP Kendari dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, LKjIP ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta acuan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi pada tahun-tahun mendatang, baik dari sisi efektivitas pencapaian sasaran maupun efisiensi penggunaan anggaran.

Secara umum, pelaksanaan seluruh program dan kegiatan BPVP Kendari pada Tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan, namun berkat kerja keras, koordinasi, serta kekompakan seluruh jajaran pegawai, hambatan tersebut dapat diatasi sehingga tidak mengganggu pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan realisasi anggaran sebesar 88,14% dengan realisasi fisik mencapai 101,24%, dan secara keseluruhan telah memenuhi target yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program serta pentingnya peningkatan komunikasi dan kerja sama yang berkelanjutan antar unit kerja dan pemangku kepentingan.

Capaian kinerja tersebut juga tercermin pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu IKK-1 mencapai 103,23%, IKK-2 mencapai 101,74%, IKK-3 mencapai 100%, dan IKK-4 mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja BPVP Kendari secara umum berada pada kategori sangat baik.

Demikian LKjIP BPVP Kendari Tahun 2025 disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja organisasi. Diharapkan laporan ini dapat menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan serta perbaikan dan penyempurnaan program dan kegiatan pada masa mendatang.



KEMNAKER LAMPIRAN





KEMNAKER

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI
DITJEN PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amran, S.T
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
Kendari

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Darmawansyah, S.T, M.Si
Jabatan : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Direktur Jenderal
Pembinaan Pelatihan Vokasi
dan Produktivitas

Kepala
Balai Pelatihan Vokasi
dan Produktivitas Kendari

Darmawansyah, S.T, M.Si
NIP. 197212051998031002

Amran, S.T
NIP. 19830312 200901 1 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025


**BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI
DITJEN PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Rincian Output	Target
1.	Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	992 Orang	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja	992 Orang
2.	Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan vokasi dan pemagangan yang Berkualitas	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	1.840 Orang	PBK UPTP	1341 Orang
				Pelatihan PFLK	3 Orang
				PBK Provinsi Sulawesi Tenggara	496 Orang
		Koordinasi penyelenggaraan Pelatihan dan Pemagangan bersama industri	1 kegiatan	Fasilitasi FKLPI	1 Kegiatan
3.	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Binalavotas	Jumlah tenaga kerja yang meningkat produktivitasnya	1 Kegiatan	Pelatihan Peningkatan Produktivitas	1 kegiatan
4.	Terlaksananya Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Terlaksananya Layanan Dukungan manajemen Internal	5 Layanan	Layanan Data & Informasi	1 Layanan
				Layanan Perkantoran	1 Layanan
				Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Layanan
				Layanan Manajemen Keuangan	1 Layanan
				Layanan Reformasi Kinerja	1 Layanan

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Rincian Output	Anggaran (Rp)
1.	4053 Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Binalavotas	587.633.000	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja	587.633.000
2.	4057 Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas	6.533.288.000	Fasilitas Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan & Industri	600.000
			PBK UPTP	4.728.869.000
			Pelatihan PFLK	12.000.000
			PBK Provinsi Sulawesi Tenggara	1.791.819.000
3.	4059 Pengembangan & Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Binalavotas	15.398.000	Pelatihan Peningkatan Produktivitas	15.398.000
4.	6988 Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	13.975.225.000	Layanan Data & Informasi	200.000.000
			Layanan Perkantoran	13.301.653.000
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	240.000.000
			Layanan Manajemen Keuangan	91.846.000
			Layanan Reformasi Kinerja	141.726.000
Jumlah		21.111.544.000		21.111.544.000


PIHAK KEDUA

Direktur Jenderal
Pembinaan Pelatihan Vokasi
dan Produktivitas


Darmawansyah, S.T, M.Si
NIP. 197212051998031002

Jakarta, November 2025
PIHAK PERTAMA

Kepala
Balai Pelatihan Vokasi
dan Produktivitas Kendari


Amran, S.T
NIP. 19830312 200901 1 014

**RENCANA AKSI ATAS KINERJA
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Target	Target Bulanan Rincian Output												Sumber Data	Unit Pelaksana	
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1	2	3	4	5	6												7	8	
1.	Terlaksananya sertifikasi kompetensi kerja	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja	992 Orang	0	32	90	0	0	0	110	0	135	115	208	302	Subkoordin ator Bidang Penyelenggaraan BPVP Kendari	BPVP Kendari	
2.	Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan vokasi dan pemagangan yang Berkualitas	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	PBK UPTP	1341 Orang	208	48	128	0	0	0	16	176	80	272	269	144	Subkoordin ator Bidang Penyelenggaraan & Subkoordin ator Bidang Pemberdayaan & Subkoordin ator Bidang P3 & Pemantauan BPVP Kendari	BPVP Kendari	
			Pelatihan PFLK	3 Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		Subbagian Umum , Subkoordin ator Bidang Penyelenggaraan & Subkoordin ator Bidang Pemberdayaan BPVP Kendari
			PBK Provinsi Sulawesi Tenggara	496 Orang	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	128	48	0		Subbagian Umum ,BPVP Kendari

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Target	Target Bulanan Rincian Output												Sumber Data	Unit Pelaksana
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	2	3	4	5	6												7	8
			Layanan Reformasi Kinerja	1 Layanan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

Jakarta, November 2025
Kepala
Balai Pelatihan Vokasi
dan Produktivitas Kendari


Amran
NIP. 19830312 200901 1 014

**REKAPITULASI UJI KOMPETENSI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PELATIHAN DAN VOKASI KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Skema	Pelaksanaan			Hasil	
		Jumlah Peserta	Tanggal	TUK	Kompeten	Tidak Kompeten
1	Barista	16	27-28 Februari	BPVP Kendari	16	0
2	Asisten Pembuat Pakaian	15	27-28 Februari	BPVP Kendari	15	0
3	Juru Ukur (Surveyor) Jenjang 2	16	3-4 Februari	BPVP Kendari	16	0
4	Pengelola Administrasi Perkantoran	16	5-6 Maret	BPVP Kendari	16	0
5	Computer Operator Assistant	16	5-6 Maret	BPVP Kendari	16	0
6	Service Sepeda Motor Injeksi	12	12-13 Maret	BPVP Kendari	11	1
7	Merias Wajah dan Menata Rambut	15	12-13 Maret	BPVP Kendari	15	0
8	Plate Welder GMAW 3G-UP/PF	16	15-16 Maret	BPVP Kendari	16	0
9	Pelayanan Pelanggan	14	25-26 Juni	BPVP Kendari	13	1
10	Plate Welder SMAW 3G-UP/PF	16	9-10 Juli 2025	BPVP Kendari	15	1
11	Pembuatan roti dan kue 1	16	17-18 Juli 2025	BLKK Kolaka	14	2
12	Juru Ukur (Surveyor)	10	18 Juli 2025	BLKK Kolaka	9	1
13	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	9		BLKK Kolaka	8	1
14	Service Sepeda Motor Injeksi	8	19 Juli 2025	BLKK Kolaka	5	3
15	Pembuatan roti dan kue	16	19-20 Juli	BLKK Kolaka	8	8
16	Computer Operator Assistant	9	22 Juli	BLKK Kolaka	5	4
17	Pengelola Administrasi Perkantoran	10	22 Juli	BLKK Kolaka	10	0
18	Perawatan AC Residential	16	22-23 Juli	BLKK Kolaka	0	16
19	Merias Wajah	8	30 Agustus	BPVP Kendari	5	3
20	Merias Wajah	16	6-7 September	BLK Buton	16	0
21	Computer Operator Assistant	16	6-7 September	BLK Buton	6	10
22	Merakit Komponen Fabrikasi	11	6-7 September	BLK Buton	5	6
23	Asisten Pembuat Pakaian Baubau Kerjasama	12	9-10 September	Bau Bau	12	0
24	Pembuatan roti dan kue	16	13-14 September	BPVP Kendari	15	1
25	Digital Office Administration Berbasis Google Workspace 1	15	13-14 September	BPVP Kendari	14	1
26	Digital Office Administration Berbasis Google Workspace 2	16	13-14 September	BPVP Kendari	16	0
27	Barista	16	16-17 September	BPVP Kendari	16	0
28	Merakit Komponen Fabrikasi	13	16-17 September	BPVP Kendari	5	8
29	Asisten Pembuat Pakaian	16	16-17 September	BPVP Kendari	7	9
30	Merias Wajah	15	2-3 Oktober	BPVP Kendari	15	0
31	Juru Ukur (Surveyor)	16	4-5 Oktober	BPVP Kendari	16	0
32	Service Sepeda Motor Injeksi	12	9-10 Oktober	BPVP Kendari	10	2
33	Pengelolaan Sistem Irigasi dengan Smart Farming System	14	20-21 Oktober	BPVP Kendari	6	8

34	Pemasangan Sistem Integrasi Bangunan Cerdas	12	20-21 Oktober	BPVP Kendari	10	2
35	Merias wajah	16	27-28 Oktober	BPVP Kendari	16	0
36	Barista	14	29-30 Oktober	BPVP Kendari	14	0
37	Merakit Komponen Fabrikasi	15	29-30 Oktober	BPVP Kendari	9	6
38	Pembuatan Roti dan Kue	16	7-8 November 2025	BPVP Kendari	16	0
39	Computer Operator Assistant	15		BPVP Kendari	14	1
40	Merias Wajah	16		BPVP Kendari	16	0
41	Practical Office Advance	15	8-9 November 2025	BPVP Kendari	15	0
42	Juru Ukur Surveyor	15		BPVP Kendari	15	0
43	Asisten Pembuat Pakaian	14		BPVP Kendari	14	0
44	Asisten Pembuat Pakaian, Pengoperasian Tools Generative Artificial Intelligence (AI)	13		BPVP Kendari	13	0
45	Pembuatan Konten Visual untuk Media Sosial	12		BPVP Kendari	10	2
46	Pengelolaan Sistem Irigasi dengan Smart Farming System	17	15 November 2025	BPVP Kendari	15	2
47	Digital Office Administration Berbasis Google Workspace 3	15		BPVP Kendari	15	0
48	Digital Office Administration Berbasis Google Workspace4	16	29-30 November 2025	BPVP Kendari	16	0
49	Practical Office Advance	15		BPVP Kendari	12	3
50	Merakit komponen fabrikasi	16		BPVP Kendari	5	11
51	Pembuatan roti dan kue	15	2-3 Desember 2025	BPVP Kendari	15	0
52	Teknisi Telepon Seluler Perangkat Keras	14		BPVP Kendari	11	3
53	Barista	13	4-5 Desember 2025	BPVP Kendari	13	0
54	Merakit Komponen Fabrikasi	16	6-7 Desember 2025	BPVP Kendari	10	6
55	Desainer Grafis Muda	16	9-10 Desember 2025	Bau Bau	13	3
56	Pembuatan Roti dan Kue	16	9-10 Desember 2025	BLKK Kolaka	16	0
57	Merakit Komponen Fabrikasi	15	11-12 Desember 2025	BLKK Kolaka	8	7
58	Pembuatan Roti dan Kue	16	11-12 Desember 2025	BLKK Kolaka	16	0
59	Merakit Komponen Fabrikasi	14	13 Desember 2023	BPVP Kendari	10	4
60	Computer Operator Assistant	15	16 Desember 2025	BPVP Kendari	10	5
61	Merias Wajah	16	17 Desember 2025	BPVP Kendari	16	0
62	Practical Office Advance	15	20 Desember 2025	BPVP Kendari	15	0
63	Housekeeping	16		BPVP Kendari	16	0
64	Digital Office Administration Berbasis Google Workspace 5	16		BPVP Kendari	16	0
65	Digital Office Administration Berbasis Google Workspace 6	16		BPVP Kendari	14	2
66	Practical Office Advance	12	23-24 Desember 2025	BPVP Kendari	12	0
67	Service Sepeda Motor Injeksi	12		BPVP Kendari	10	2
68	Juru Ukur (Surveyor)	16	27-28 Desember 2025	BPVP Kendari	16	0
69	Digital Office Administration Berbasis Google Workspace 7	14	29-30 Desember 2025	BPVP Kendari	14	0
70	Digital Office Administration Berbasis Google Workspace 8	15		BPVP Kendari	14	1
71	Merakit Komponen Fabrikasi	16		BPVP Kendari	13	3
TOTAL		1024			875	149

REKAPITULASI PELAKSANAAN PBK DI UPTP BPVP KENDARI

TAHUN 2025

KEJURUAN	PROGRAM PELATIHAN	JP	Realisasi			
			Paket		Orang	
Non BOARDING						
Bisman	Pengelola Administrasi Perkantoran	260 JP	1	pkt	16	Orang
Bisman	Pelayanan Pelanggan	180 JP	1	pkt	16	Orang
Fashion Technology	Asisten Pembuat Pakaian	180 JP	3	pkt	48	Orang
Pariwisata	Barista Café	180 JP	4	pkt	64	Orang
Pariwisata	Housekeeping	180 JP	1	pkt	16	Orang
Pertambangan	Operator Track Excavator	280 JP	3	pkt	48	Orang
Refrigerasi	Teknisi Perawatan AC Residential	180 JP	1	pkt	16	Orang
Tata Kecantikan	Merias Wajah dan Menata Rambut	300 JP	2	pkt	32	Orang
Tata Kecantikan	Merias Wajah	160 JP	4	pkt	64	Orang
Teknik Bangunan	Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan	260 JP	4	pkt	64	Orang
Teknik Bangunan	Juru Ukur (Surveyor)	260 JP	1	pkt	16	Orang
Teknik Elektronika	Teknisi Telepon Seluler Perangkat Keras	260 JP	1	pkt	16	Orang
Teknik Las	Plate Welder SMAW 3G-UP/PF	340 JP	2	pkt	32	Orang
Teknik Las	Perakitan Komponen Fabrikasi	180 JP	6	pkt	96	Orang
Teknik Otomotif	Service Sepeda Motor Sistem Injeksi	280 JP	3	pkt	48	Orang
TIK	Computer Operator Assistant	260 JP	3	pkt	48	Orang
TIK	Junior Desain Grafis	232 JP	1	pkt	16	Orang
TIK	Parctical Office Advance	260 JP	4	pkt	64	Orang
TP. Pertanian	Pembuatan Roti dan Kue	140 JP	4	pkt	64	Orang
Total Paket			49 Paket		784 Orang	
PBL Smart Sektor						
PBL Smart Sektor	Automatic Irrigation System	200 JP	2	pkt	32	Orang
PBL Smart Sektor	Digital Office Administration Berbasis Google Workspace	200 JP	8	pkt	128	Orang
PBL Smart Sektor	Pembuatan Konten Visual untuk Sosial Media	200 JP	3	pkt	48	Orang
PBL Smart Sektor	Pengoperasian Tools Generative AI untuk Konten Digital dan Bisnis	200 JP	3	pkt	48	Orang
PBL Smart Sektor	Teknisi Sistem Integrasi Bangunan Cerdas	200 JP	2	pkt	32	Orang
Total Paket			18 Paket		288 Orang	
Tailor Made Training						
Fashion Technology	Menjahit Pakaian Pemula	80 JP	1	pkt	16	Orang
Pariwisata	Pembuatan Minuman Kopi untuk Café	80 JP	2	pkt	32	Orang
Tata Kecantikan	Flawlesh Make Up Look	80 JP	1	pkt	16	Orang

Teknik Las	Perakitan Produk Fabrikasi	80 JP	1	pkt	16	Orang
TIK	Microsoft Office Untuk Perkantoran	80 JP	1	pkt	16	Orang
TP. Pertanian	Pembuatan Jajanan Pasar	80 JP	2	pkt	32	Orang
TP. Pertanian	Pembudidayaan Sayuran Hidroponik	80 JP	1	pkt	16	Orang
TP. Pertanian	Pengolahan Makanan Bergizi Gratis	80 JP	2	pkt	32	Orang
TP. Pertanian	Penjamah Makanan	80 JP	4	pkt	64	Orang
Total Paket		15 Paket			240 Orang	
Total Paket UPTP		82 Paket			1312 Orang	

**REKAPITULASI PELAKSANAAN PBK DI UPTD BINAAN BPVP KENDARI
TAHUN 2025**

KEJURUAN	PROGRAM PELATIHAN	JP	Realisasi			
			Paket		Orang	
BLK Kolaka Utara						
Teknik Las	Fitter Structure	240 JP	2	pkt	16	Orang
TIK	Compter Operator Assistant	260 JP	1	pkt	16	Orang
Fashion Technology	Asisten Pembuat Pakaian	180 JP	2	pkt	32	Orang
Total Paket		5 Paket		80 Orang		
BLK Buton						
Teknik Las	Fitter Structure	240 JP	3	pkt	48	Orang
TIK	Compter Operator Assistant	260 JP	1	pkt	16	Orang
Tata Kecantikan	Merias Wajah	160 JP	1	pkt	16	Orang
Teknik Listrik	Pemasangan Instalasi Bangunan Sederhana	260 JP	1	pkt	16	Orang
Teknik Otomotif	Service Sepeda Motor Sistem Injeksi	260 JP	1	pkt	16	Orang
Total Paket		5 Paket		80 Orang		
BLK Kolaka						
Bisman	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	240 JP	2	pkt	32	Orang
Fashion Technology	Asisten Pembuat Pakaian	180 JP	1	pkt	16	Orang
Fashion Technology	Menjahit Pakaian Dewasa	240 JP	1	pkt	16	Orang
Teknik Bangunan	Juru Ukur (Surveyor)	260 JP	2	pkt	32	Orang
Teknik Bangunan	Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan	260 JP	1	pkt	16	Orang
Teknik Otomotif	Service Sepeda Motor Sistem Injeksi	260 JP	1	pkt	16	Orang
Processing	Pembuatan Roti dan Kue	140 JP	2	pkt	32	Orang
Refrigerasi	Teknisi Perawatan AC Residential	180 JP	1	pkt	16	Orang
TIK	Computer Operator Assistant	260 JP	1	pkt	16	Orang
TIK	Junior Desain Muda	260 JP	1	pkt	16	Orang
TP. Pertanian	Pembuatan Roti dan Kue	140 JP	1	pkt	16	Orang
Teknik Las	Fitter Structure	240 JP	1	pkt	16	Orang
Total Paket		15 Paket		240 Orang		
BLK Konawe Selatan						
Bisman	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	240 JP	1	pkt	16	Orang
Fashion Technology	Asisten Pembuat Pakaian	180 JP	1	pkt	16	Orang

Fashion Technology	Menjahit Pakaian Dewasa	240 JP	1	pkt	16	Orang
Teknik Otomotif	Service Sepeda Motor Sistem Injeksi	260 JP	1	pkt	16	Orang
Processing	Pembuatan Roti dan Kue	140 JP	1	pkt	16	Orang
TIK	Computer Operator Assistant	260 JP	2	pkt	32	Orang
Total Paket		7 Paket			112 Orang	
BLK Konawe Utara						
Teknik Las	Fitter Structure	240 JP	1	pkt	16	Orang
Fashion Technology	Asisten Pembuat Pakaian	180 JP	1	pkt	16	Orang
Tata Kecantikan	Merias Wajah	160 JP	1	pkt	16	Orang
Total Paket		3 Paket			48 Orang	
Total Paket UPTD Binaan		35 Paket			560 Orang	

REALISASI PELATIHAN DURASI PENDEK BPVP KENDARI TAHUN 2025

KEJURUAN	PROGRAM PELATIHAN	JP	Realisasi			
			Paket		Orang	
Non BOARDING						
Teknik Bangunan	Pembuatan Shopdrawing Bangunan Gedung	24 JP	1	pkt	16	Orang
Teknik Bangunan	Perhitungan Estimasi Biaya Jalan	24 JP	1	pkt	16	Orang
Teknik Elektronika	Memperbaiki LCD dan Baterai Telepon Seluler	40 JP	1	pkt	16	Orang
Fashion Technology	Desain Busana secara Digital	30 JP	1	pkt	16	Orang
Teknik Listrik	Sistem Otomasi Industri Berbasis PLC	40 JP	1	pkt	16	Orang
Teknik Otomotif	Perawatan CVT dan Injeksi Sepeda Motor	40 JP	1	pkt	16	Orang
Produktivitas	Penilaian Produktivitas Kinerja Organisasi	40 JP	1	pkt	16	Orang
TIK	Microsoft Office Untuk Advance : Excel 1	40 JP	1	pkt	16	Orang
TIK	Microsoft Office Untuk Advance : Excel 1	40 JP	1	pkt	16	Orang
TIK	Microsoft Office Untuk Pemula : Excel 1	40 JP	1	pkt	16	Orang
TIK	Microsoft Office Untuk Pemula : Excel 1	40 JP	1	pkt	16	Orang
Total Paket			11 Paket		176 Orang	



REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	4053 Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Binalavotas	PAGU REALISASI	0 0.00%	587,633,000 473,403,537 (80.56%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	587,633,000 473,403,537 (80.56%)
		SISA	0	114,229,463	0	0	0	0	0	0	0	114,229,463
2	4057 Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas	PAGU REALISASI	0 0.00%	6,533,288,000 5,716,622,057 (87.50%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	6,533,288,000 5,716,622,057 (87.50%)
		SISA	0	816,665,943	0	0	0	0	0	0	0	816,665,943
3	4059 Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Binalavotas	PAGU REALISASI	0 0.00%	15,398,000 15,396,810 (99.99%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	15,398,000 15,396,810 (99.99%)
		SISA	0	1,190	0	0	0	0	0	0	0	1,190
4	6988 Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	PAGU REALISASI	10,270,236,000 10,258,420,173 (99.88%)	3,704,989,000 2,144,004,168 (57.87%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	13,975,225,000 12,402,424,341 (88.75%)
		SISA	11,815,827	1,560,984,832	0	0	0	0	0	0	0	1,572,800,659
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	10,270,236,000 10,258,420,173 (99.88%)	10,841,308,000 8,349,426,572 (77.01%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	21,111,544,000 18,607,846,745 (88.14%)
		SISA	11,815,827	2,491,881,428	0	0	0	0	0	0	0	2,503,697,255



REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	209255 BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI	PAGU REALISASI	10,270,236,000 10,258,420,173 (99.88%)	10,841,308,000 8,349,426,572 (77.01%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	21,111,544,000 18,607,846,745 (88.14%)
		SISA	11,815,827	2,491,881,428	0	0	0	0	0	0	0	2,503,697,255
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	10,270,236,000 10,258,420,173 (99.88%)	10,841,308,000 8,349,426,572 (77.01%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	21,111,544,000 18,607,846,745 (88.14%)
		SISA	11,815,827	2,491,881,428	0	0	0	0	0	0	0	2,503,697,255



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	060	026	209255	BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI	Nilai	100.00	57.63	95.31	93.33	100.00	84.22	100.00	90.46	100%	0.00	90.46
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.64	19.06	9.33	10.00	8.42	25.00				
					Nilai Aspek	78.82		93.22				100.00				



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 026.13.2.209255/2025**



DS:1137-2040-5731-3892

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (026) KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
2. Unit Organisasi : (13) DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
3. Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
4. Kode>Nama Satker : (209255) BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI
- Sebesar : Rp. 25.515.105.000 (DUA PULUH LIMA MILIAR LIMA RATUS LIMA BELAS JUTA SERATUS LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	25.491.105.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	24.000.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN K E N D A R I (060) Rp. 25.515.105.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 026.13.2.209255/2025**



DS:7577-8758-9246-0563

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 01

Tanggal : 21 Februari 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- Kementerian Negara/Lembaga : (026) KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
- Unit Organisasi : (13) DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
- Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
- Kode>Nama Satker : (209255) BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI
- Sebesar : Rp. 25.515.105.000 (DUA PULUH LIMA MILIAR LIMA RATUS LIMA BELAS JUTA SERATUS LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	25.491.105.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	24.000.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- KPPN K E N D A R I (060) Rp. 25.515.105.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

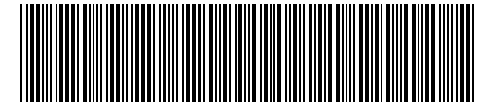
- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 026.13.2.209255/2025**



DS:7577-8758-9246-0563

Revisi ke 02

Tanggal : 24 April 2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (026) | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN |
| 2. Unit Organisasi | : (13) | DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS |
| 3. Provinsi | : (20) | SULAWESI TENGGARA |
| 4. Kode>Nama Satker | : (209255) | BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI |
| Sebesar | : Rp. | 25.515.105.000 (DUA PULUH LIMA MILIAR LIMA RATUS LIMA BELAS JUTA SERATUS LIMA RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	25.491.105.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	24.000.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN K E N D A R I (060) Rp. 25.515.105.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

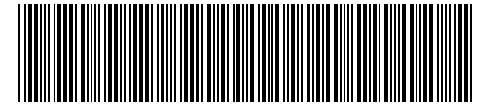
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 026.13.2.209255/2025**



DS:7577-8758-9246-0563

Revisi ke 03

Tanggal : 28 Mei 2025

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- Kementerian Negara/Lembaga : (026) KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
- Unit Organisasi : (13) DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
- Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
- Kode>Nama Satker : (209255) BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI
- Sebesar : Rp. 25.515.105.000 (DUA PULUH LIMA MILIAR LIMA RATUS LIMA BELAS JUTA SERATUS LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	25.491.105.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	24.000.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- KPPN K E N D A R I (060) Rp. 25.515.105.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 026.13.2.209255/2025**



DS:9940-4267-0881-9210

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 04

Tanggal : 16 Juni 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (026) KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
2. Unit Organisasi : (13) DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
3. Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
4. Kode>Nama Satker : (209255) BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI
- Sebesar : Rp. 25.515.105.000 (DUA PULUH LIMA MILIAR LIMA RATUS LIMA BELAS JUTA SERATUS LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	25.491.105.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	24.000.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN K E N D A R I (060) Rp. 25.515.105.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

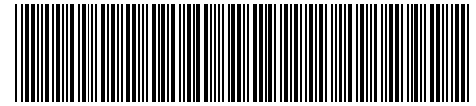
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 026.13.2.209255/2025**



DS:9940-4267-0881-9210

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 05

Tanggal : 16 Juli 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (026) KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
2. Unit Organisasi : (13) DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
3. Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
4. Kode>Nama Satker : (209255) BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI
- Sebesar : Rp. 25.515.105.000 (DUA PULUH LIMA MILIAR LIMA RATUS LIMA BELAS JUTA SERATUS LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	25.491.105.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	24.000.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN K E N D A R I (060) Rp. 25.515.105.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 026.13.2.209255/2025**



DS:5567-8523-1019-6971

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 06

Tanggal : 21 Agustus 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- Kementerian Negara/Lembaga : (026) KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
- Unit Organisasi : (13) DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
- Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
- Kode>Nama Satker : (209255) BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI
- Sebesar : Rp. 25.630.105.000 (DUA PULUH LIMA MILIAR ENAM RATUS TIGA PULUH JUTA SERATUS LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	25.606.105.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	24.000.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- KPPN K E N D A R I (060) Rp. 25.630.105.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 026.13.2.209255/2025**



DS:5567-8523-1019-6971

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 07

Tanggal : 17 September 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (026) KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
2. Unit Organisasi : (13) DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
3. Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
4. Kode>Nama Satker : (209255) BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI
- Sebesar : Rp. 25.630.105.000 (DUA PULUH LIMA MILIAR ENAM RATUS TIGA PULUH JUTA SERATUS LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	25.606.105.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	24.000.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN K E N D A R I (060) Rp. 25.630.105.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

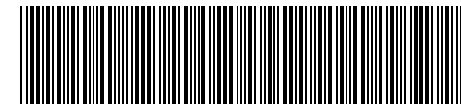
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 026.13.2.209255/2025**



DS:5567-8523-1019-6971

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 08

Tanggal : 14 Oktober 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (026) KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
2. Unit Organisasi : (13) DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
3. Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
4. Kode>Nama Satker : (209255) BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI
- Sebesar : Rp. 25.630.105.000 (DUA PULUH LIMA MILIAR ENAM RATUS TIGA PULUH JUTA SERATUS LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	25.606.105.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	24.000.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN K E N D A R I (060) Rp. 25.630.105.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

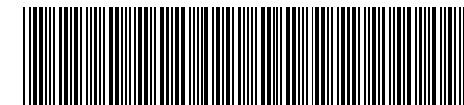
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 026.13.2.209255/2025**



DS:0107-0395-0077-1292

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 09

Tanggal : 13 November 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- Kementerian Negara/Lembaga : (026) KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
- Unit Organisasi : (13) DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
- Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
- Kode>Nama Satker : (209255) BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI
- Sebesar : Rp. 21.111.544.000 (DUA PULUH SATU MILIAR SERATUS SEBELAS JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	21.099.544.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	12.000.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- KPPN K E N D A R I (060) Rp. 21.111.544.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

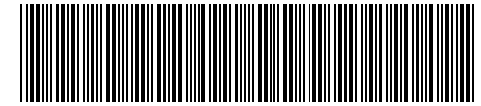
- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 026.13.2.209255/2025**



DS:0107-0395-0077-1292

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 10

Tanggal : 09 Desember 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (026) KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
2. Unit Organisasi : (13) DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
3. Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
4. Kode>Nama Satker : (209255) BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI
- Sebesar : Rp. 21.111.544.000 (DUA PULUH SATU MILIAR SERATUS SEBELAS JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	21.099.544.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	12.000.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN K E N D A R I (060) Rp. 21.111.544.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

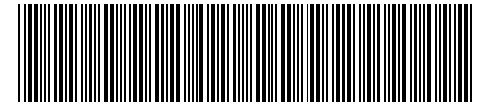
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 026.13.2.209255/2025**



DS:0107-0395-0077-1292

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 11

Tanggal : 12 Desember 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (026) KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
2. Unit Organisasi : (13) DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
3. Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
4. Kode>Nama Satker : (209255) BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI
- Sebesar : Rp. 21.111.544.000 (DUA PULUH SATU MILIAR SERATUS SEBELAS JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	21.099.544.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	12.000.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN K E N D A R I (060) Rp. 21.111.544.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002